



**ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN PENGELOLAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
(PBB-P2) MENJADI PAJAK DAERAH  
(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Oleh

**KINANTI AMALIA SARI**

**NIM 120810301153**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN PENGELOLAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
(PBB-P2) MENJADI PAJAK DAERAH  
(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh

**KINANTI AMALIA SARI**

**NIM 120810301153**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta, Catur Darmoko dan Suhartini, yang tak hentinya mendoakan, mendukung dan memotivasi sampai saat ini;
2. Adikku tersayang, Puteri Lovita Asmarandani, yang terus menyemangati, mendoakan, dan membantu segala hal;
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi dan mendoakan sampai saat ini;
4. Guru dan dosen pembimbing yang tak pernah lelah membantu, membimbing, dan membagi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat;
5. Seluruh teman terbaikku, Ridho, Wulan, Ines, Hesti, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas segala bantuan, doa, dan motivasinya;
6. Seluruh teman Akuntansi angkatan 2012, kakak angkatan, teman-teman Melodynomi, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas segala doa, dukungan, dan semangatnya;
7. Almamater kebanggaan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**MOTTO**

"Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala,  
dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata."

(WS Rendra)

*"Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success  
when they gave up."*

(Thomas Alfa Edison)

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kinanti Amalia Sari

NIM : 120810301153

Judul Skripsi : ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN  
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MENJADI PAJAK  
DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER)

Konsentrasi : Perpajakan/Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan termasuk karya jiplakan, kecuali terdapat kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Februari 2016

Yang menyatakan,

Kinanti Amalia Sari

NIM 120810301153

**SKRIPSI**

**ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN PENGELOLAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
(PBB-P2) MENJADI PAJAK DAERAH  
(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)**

Oleh

**KINANTI AMALIA SARI**

**NIM 120810301153**

**Pembimbing**

Dosen Pembimbing Utama : Taufik Kurrohman SE, M.Si, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Nur Hisamuddin S.E., M.SA, Ak.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul skripsi : Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)

Nama Mahasiswa : Kinanti Amalia Sari

N I M : 120810301153

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 18 September 2015

*Yang Menyetujui,*

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Taufik Kurrohman SE, M.Si, Ak.

NIP. 198207232005011002

Nur Hisamuddin S.E., M.SA., Ak

NIP. 197910142009121001

*Mengetahui,*

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak.

NIP. 197107271995121001

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENGALIHAN PENGELOLAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
(PBB-P2) MENJADI PAJAK DAERAH  
(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Kinanti Amalia Sari  
NIM : 120810301153  
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

29 Februari 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Andriana S.E, M.Sc (.....)  
NIP 198209292010122002

Sekretaris : Kartika S.E., M.Sc, Ak (.....)  
NIP 198202072008122002

Anggota : Rochman Effendi SE, M.Si, Ak (.....)  
NIP 197102172000031001

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Dekan

Dr. Moehammad Fathorrazi M.Si.  
NIP 19630614 199002 1 001

**Kinanti Amalia Sari**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

**Abstrak**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah membuat seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Jember, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kegiatan pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah dan kemakmuran masyarakat. Kabupaten Jember telah siap menerapkan undang-undang tersebut pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah pengalihannya, dengan rentang waktu yang diteliti adalah empat tahun terakhir (2011-2014). Objeknya adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, selaku pihak yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 setelah diterapkannya undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif komparatif. Menganalisis datanya adalah dengan analisis trend.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB-P2, pajak daerah, efisiensi, efektivitas, kontribusi, Pendapatan Daerah

**Kinanti Amalia Sari**

*Accounting Department, Economic Faculty, Jember University*

## ***Abstract***

*The enactment of Law No. 28 Year 2009 on Local Taxes and Levies make all regions in Indonesia, including the district of Jember, are fully responsible for the entire collection and management of Property Taxes in Rural and Urban that will be used for regional development and prosperity of society. Jember is ready to implement the law in 2013. This research is to determine the efficiency, effectiveness, and Property Taxes in Rural and Urban contribution to local revenue before and after the transfer, with the time span studied were the last four years (2011-2014). The object is Jember District Revenue Service, which is responsible for the entire collection and management of Property Taxes in Rural and Urban after the implementation of the law. This research is a quantitative study with comparative descriptive method. Analyzing data with trend analysis.*

***Key Word:*** *Law No. 28 Year 2009, Property Taxes in Rural and Urban, Local Tax, efficiency, effectiveness, Contribution, Local Revenue*

## RINGKASAN

**Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember);** Kinanti Amalia Sari; 120810301153; 2016; 95 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan daerah yang sangat penting untuk proses pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Salah satu bentuk pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, merupakan potensi besar yang bisa diterima negara untuk pembangunan nasional. Menurut Suryanto (2014) pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan untuk memperkuat desentralisasi fiskal yang bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana, meliputi pembiayaan mandiri dan pemulihan biaya dalam pelayanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak secara lebih tepat, transfer dana ke daerah, utamanya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara lebih adil, kewenangan daerah untuk melakukan pinjaman berdasar kebutuhan daerah. Salah satu bentuk manifestasi dari desentralisasi fiskal tersebut adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Implementasi undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuat daerah menjadi lebih mandiri dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerahnya. Pengoptimalisasian penerimaan Pendapatan Daerah ini sangat penting bagi daerah untuk mengoptimalkan pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, pembagian dan mekanisme perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu 10% untuk pajak pusat dan 90% untuk pajak daerah. Dari

90% bagian tersebut, dibagi untuk provinsi sebesar 16,2%, biaya pemungutan/BP sebesar 9%, dan Kabupaten/Kota sebesar 64,8%. Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud meliputi sektor perdesaan dan perkotaan (P2), serta sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3). Sesudah munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah yaitu dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Berlakunya undang-undang tersebut (paling lambat tanggal 1 Januari 2014), berarti bahwa seluruh kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Sehingga diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang sangat potensial. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang menerapkan undang-undang ini pada tahun 2013.

Menurut berita, sebelum pengalihan pengelolaan PBB-P2, potensi PBB-P2 Jember yang dapat dikelola pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp 26 milyar setiap tahun. Namun setelah dianalisis bersama konsultan terjadi peningkatan menjadi Rp 60 milyar, lalu setelah pemutakhiran data dilaksanakan terjadi penurunan menjadi Rp 50 milyar. Namun Pemerintah Kabupaten Jember tetap optimis PBB-P2 merupakan andalan untuk mencapai target PAD tahun 2014 (sumber: [www.jemberpost.com](http://www.jemberpost.com)). Hal itu membuktikan bahwa Kabupaten Jember berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dari penerimaan PBB-P2 yang juga akan meningkatkan Pendapatan Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah pengalihannya dengan rentang waktu yang diteliti adalah empat tahun terakhir (2011-2014). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif komparatif. Objeknya adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Sumber datanya adalah dari data biaya pemungutan/Biaya Operasional Pemungutan (BOP) PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2011-2014, data realisasi PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2011-2014, dan Laporan target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah/APBD Kabupaten Jember tahun 2011-2014 serta wawancara dengan petugas terkait. Metode analisisnya adalah dengan analisis trend.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2014 tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember secara keseluruhan menunjukkan kriteria sangat efisien, yang berarti bahwa Kabupaten Jember telah optimal dalam memanfaatkan biaya pemungutan/Biaya Operasional Pemungutan (BOP) dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan penerimaan dari PBB-P2, dengan trend/kecenderungan yang turun dari tahun 2011-2014, yang berarti semakin baik. Selanjutnya, tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2011 menunjukkan tidak efektif, tahun 2012 dan 2014 menunjukkan kurang efektif, tahun 2013 (saat pengalihan) menunjukkan cukup efektif, yang berarti bahwa Kabupaten Jember belum maksimal mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, trend/kecenderungan efektivitasnya adalah naik dari tahun 2011 sampai tahun 2014, yang berarti semakin baik. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2014 secara keseluruhan dapat dikatakan masih sangat kecil terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Jember. Namun, trend/kecenderungan kontribusinya adalah naik dari tahun 2011 sampai tahun 2014, yang berarti bahwa kontribusi terhadap Pendapatan Daerah terus meningkat. Kemudian, pengelolaan PBB-P2 setelah pengalihan lebih efisien, lebih efektif serta kontribusinya lebih besar daripada sebelum pengalihan.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Phd., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik;
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Taufik Kurrohman SE, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Nur Hisamuddin S.E., M.SA, Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan sabar dan tulus memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang membangun;
6. Bapak Suprpto, selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Bapak Hendra, selaku Kasie Penagihan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, serta seluruh pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Jember lainnya yang turut serta dalam membantu menyiapkan data dan bersedia menjadi narasumber dalam proses pembuatan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak atau Ibu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Jember, khususnya pada Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat;
8. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;

9. Orang tua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan;
10. Guru-guru di kehidupan penulis yang sangat berjasa;
11. Semua sahabat, teman seperjuangan di kampus dan organisasi, serta kakak tingkat atas bantuan dan semangatnya;
12. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan penulisan berikutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Jember, 8 Februari 2016

Penulis

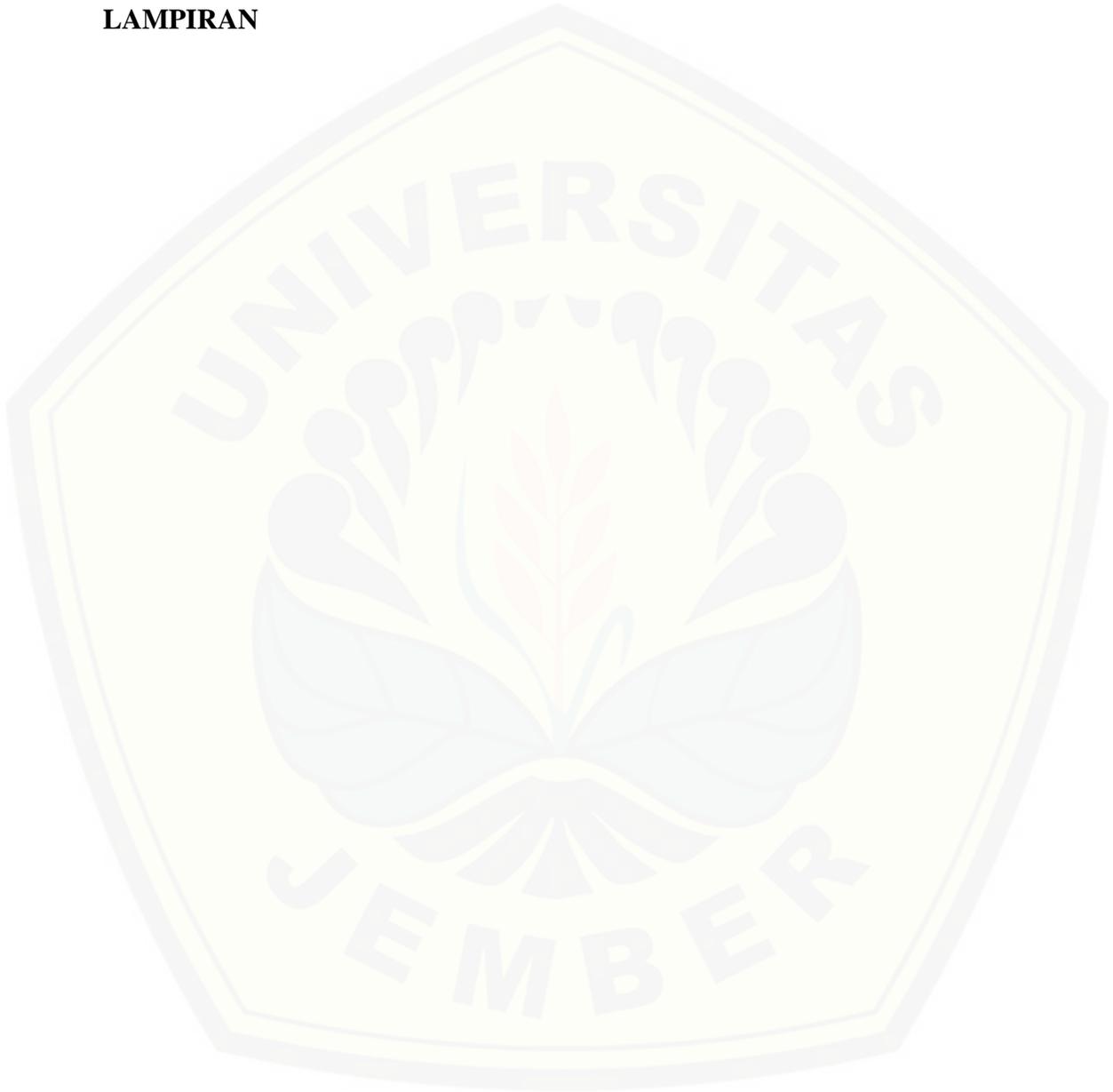
**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xixx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Konsep Pajak .....</b>	<b>8</b>

2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	9
2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .....	10
2.1.4.1 Pengertian.....	10
2.1.4.2 Dasar Hukum.....	10
2.1.4.3 Objek Pajak .....	11
2.1.4.4 Objek Pajak Tidak Kena Pajak (OPTKP) .....	12
2.1.4.5 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) .....	12
2.1.4.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak .....	13
2.1.4.7 Tarif Pajak.....	13
2.1.4.8 Perhitungan Besaran Pokok PBB-P2 .....	13
<b>2.2 Pendapatan Daerah .....</b>	<b>14</b>
<b>2.3 Pengukuran Kinerja.....</b>	<b>15</b>
<b>2.4 Efisiensi.....</b>	<b>16</b>
<b>2.5 Efektivitas.....</b>	<b>17</b>
<b>2.6 Kontribusi.....</b>	<b>18</b>
<b>2.7 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>3.2 Objek Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>3.3 Batasan Penelitian .....</b>	<b>22</b>

<b>3.4 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>22</b>
<b>3.5 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>23</b>
<b>3.6 Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>23</b>
<b>3.7 Metode Analisis Data.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
<b>4.1 Gambaran Umum.....</b>	<b>29</b>
4.1.1 Profil Kabupaten Jember.....	29
4.1.2 Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah Kabupaten Jember .....	31
4.1.3 Pemungutan PBB-P2 Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah Kabupaten Jember .....	35
<b>4.2 Hasil Penelitian .....</b>	<b>37</b>
4.2.1 Data Penelitian .....	37
4.2.2 Efisiensi Penerimaan PBB-P2.....	39
4.2.3 Efektivitas Penerimaan PBB-P2 .....	42
4.2.4 Kontribusi Penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah.....	46
<b>4.3 Pembahasan .....</b>	<b>49</b>
4.3.1 Analisis Efisiensi Penerimaan PBB-P2.....	49
4.3.2 Analisis Efektivitas Penerimaan PBB-P2 .....	52
4.3.3 Analisis Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Daerah .....	54
<b>BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>56</b>
<b>5.2 Keterbatasan .....</b>	<b>57</b>

5.3 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	

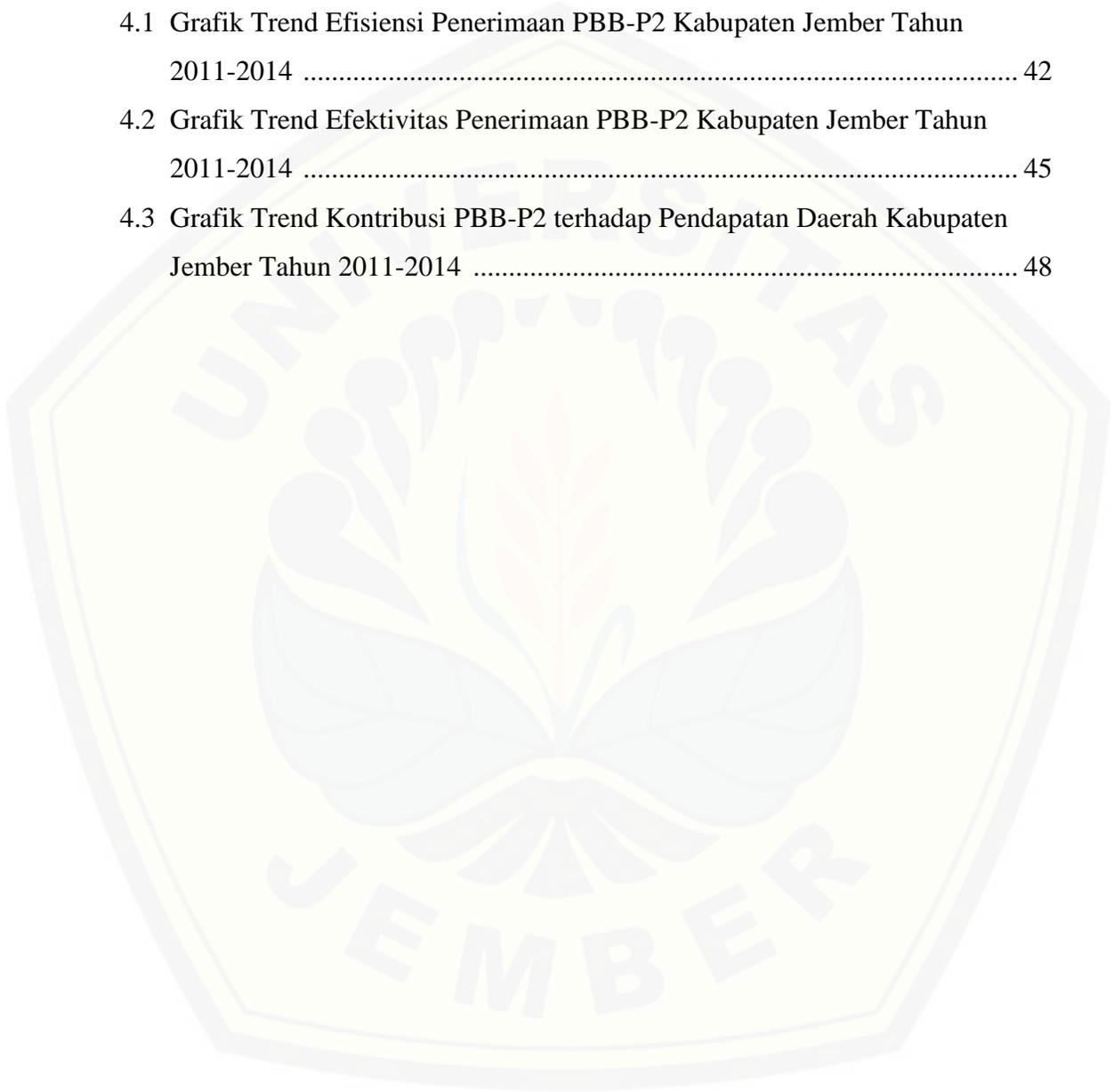


**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
2.1 Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009 .....	11
4.1 Nama Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW, RT, serta Luas Wilayah Kabupaten Jember .....	31
4.2 Data Biaya Pemungutan, Target Penerimaan, Realisasi Penerimaan PBB-P2, serta Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2014 .....	37
4.3 Efisiensi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember Tahun 2011-2014 .....	40
4.4 Perubahan dan Rata-rata Efisiensi Tahun 2011-2014 .....	41
4.5 Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember Tahun 2011-2014 .....	43
4.6 Perubahan dan Rata-rata Efektivitas Tahun 2011-2014 .....	45
4.7 Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2014 .....	47
4.8 Perubahan dan Rata-rata Kontribusi Tahun 2011-2014 .....	48

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
4.1 Grafik Trend Efisiensi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember Tahun 2011-2014 .....	42
4.2 Grafik Trend Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember Tahun 2011-2014 .....	45
4.3 Grafik Trend Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2014 .....	48



**DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	62
LAMPIRAN 2 Hasil Wawancara.....	63
LAMPIRAN 3 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Jember Tahun 2011-2014.....	68
LAMPIRAN 4 Daftar Realisasi PBB-P2 Kabupaten Jember Tahun 2011 .....	69
LAMPIRAN 5 Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011.....	70
LAMPIRAN 6 Daftar Realisasi PBB-P2 Kabupaten Jember Tahun 2012.....	77
LAMPIRAN 7 Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012.....	78
LAMPIRAN 8 Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013.....	84
LAMPIRAN 9 Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014.....	90

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan daerah, tercantum dalam APBN dan APBD, yang sangat penting untuk proses pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dalam APBN yaitu pajak pusat, sedangkan penerimaan pajak dalam APBD yaitu pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9). Sedangkan Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Suryanto (2014) pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan untuk memperkuat desentralisasi fiskal. Beliau menjelaskan bahwa Desentralisasi fiskal, yang diatur dalam undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana, meliputi pembiayaan mandiri dan pemulihan biaya dalam pelayanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak secara lebih tepat, transfer dana ke daerah, utamanya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara lebih adil, kewenangan daerah untuk melakukan pinjaman berdasar kebutuhan daerah. Salah satu bentuk manifestasi dari desentralisasi fiskal tersebut adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuat daerah menjadi lebih mandiri dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatannya. Pengoptimalisasian penerimaan Pendapatan Daerah ini sangat penting bagi daerah untuk mengoptimalkan pembiayaan

pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan yang dapat membuat pembangunan daerah berkembang secara berkelanjutan adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordian dkk., 2007:49). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pembagian dan mekanisme perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu 10% untuk pajak pusat dan 90% untuk pajak daerah. Dari 90% bagian tersebut, dibagi untuk provinsi sebesar 16,2%, biaya pemungutan/BP sebesar 9%, dan Kabupaten/Kota sebesar 64,8%. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dibagi menjadi lima jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 merupakan PBB yang meliputi sektor perdesaan dan perkotaan sedangkan PBB P3 merupakan PBB yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berisi tentang pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Maka dari itu, seluruh kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah yaitu dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan

retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Berlakunya kebijakan ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang sangat potensial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014 (sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten dari 105 kabupaten/kota yang baru melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah pada tahun 2013. Sebelumnya Kota Surabaya telah melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2011, sekaligus sebagai kota pertama yang menerapkannya. Kemudian pada tahun 2012 terdapat 17 kabupaten/kota yang telah melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Sebelum pengalihan pengelolaan PBB-P2, potensi PBB-P2 Jember yang dapat dikelola pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp 26 milyar setiap tahun. Namun setelah dianalisis bersama konsultan terjadi peningkatan menjadi Rp 60 milyar, lalu setelah pemutakhiran data dilaksanakan terjadi penurunan menjadi Rp 50 milyar. Namun Pemerintah Kabupaten Jember tetap optimis PBB-P2 merupakan andalan untuk mencapai target PAD tahun 2014 (sumber: [www.jemberpost.com](http://www.jemberpost.com)). Hal itu membuktikan bahwa Kabupaten Jember berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dari penerimaan PBB-P2 yang juga akan meningkatkan Pendapatan Daerah, karena terlihat banyaknya pemukiman dan industri yang ada, baik di perdesaan maupun perkotaan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang mewakili beberapa kota/kabupaten di Indonesia menunjukkan perbedaan hasil yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan Pradita, dkk (2014) dengan judul “Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya” menunjukkan pada tahun 2011-2013

tingkat efektivitas intensifikasi pemungutan PBB-P2 berada pada kriteria cukup efektif dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD termasuk dalam kriteria sedang. Sedangkan di Kabupaten Gresik, Kabupaten Mataram, dan Kota Denpasar tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 menunjukkan kriteria sangat efektif. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gresik oleh Adelina (2013) dengan judul “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik” menunjukkan pada tahun 2007-2011 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berada pada kriteria sangat efektif, serta tingkat kontribusi PBB terhadap PAD termasuk dalam kriteria sangat kurang. Selanjutnya penelitian yang dilakukan di Kabupaten Mataram oleh Nurmalasari (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan Pengelolaan serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah” menunjukkan pada tahun 2009-2013 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berada pada kriteria sangat efektif, serta tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD mengalami fluktuasi dan berada pada posisi ketiga dari seluruh pajak daerah. Kemudian penelitian serupa juga dilakukan di Kota Denpasar oleh Damaiyanti, dkk (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013” dan Prathiwi, dkk (2015) dengan judul “Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014”. Keduanya menunjukkan kriteria tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 berada pada kriteria sangat efektif. Penelitian Damaiyanti, dkk (2014) menunjukkan pada tahun 2009-2013 tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kota Denpasar menunjukkan kriteria kurang. Di Kabupaten Probolinggo, penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, dkk (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)” menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan PBB kurang efektif.

Dari pemaparan singkat beberapa penelitian sebelumnya terlihat bahwa variabel yang diambil rata-rata adalah efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan

Daerah. Penulis tertarik untuk menambahkan variabel, yaitu efisiensi. Hal tersebut dikarenakan efisiensi dapat mencerminkan bagaimana proses dari pemungutan PBB-P2 yang telah berlangsung di Kabupaten Jember. Keberhasilan organisasi dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target kurang memiliki arti jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target tersebut lebih besar daripada realisasi penerimaannya. Dengan mengetahui tingkat efisiensi dari pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Jember ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dalam proses pemungutan PBB-P2 dilihat dari berbagai faktor. Selain itu, pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengelolaan PBB-P2 sebelum atau sesudah pengalihan menjadi pajak daerah. Maka dari itu, penulis juga tertarik untuk membandingkan bagaimana pengelolaan PBB-P2 sebelum dan sesudah pengalihan menjadi pajak daerah. Dengan begitu, dapat diketahui perbedaan prosesnya maupun hasilnya yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperbaiki kebijakan kedepannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian, diantaranya:

- 1) Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaannya di Kabupaten Jember dari tahun 2011-2014?
- 2) Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaannya di Kabupaten Jember dari tahun 2011-2014?

- 3) Bagaimana kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaannya di Kabupaten Jember dari tahun 2011-2014?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaannya di Kabupaten Jember dari tahun 2011-2014.
- 2) Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaannya di Kabupaten Jember dari tahun 2011-2014.
- 3) Untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaannya di Kabupaten Jember dari tahun 2011-2014.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui mulai dari proses pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah, kemudian perbandingan sebelum dan sesudah pengalihan, efisiensi dan efektivitas dari penerimaan PBB-P2 serta kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah sebelum dan sesudah pengalihan pengelolaan PBB-P2 sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat untuk kedepannya.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya apabila akan melanjutkan penelitian ini atau akan meneliti dengan topik bahasan yang berkaitan.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi pemerintah mengenai keefisiensian dan keefektivitasan penerimaan PBB-P2 serta kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sehingga pihak pemerintah dapat melakukan pertimbangan dan perbaikan pada beberapa hal guna meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Pajak

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sehingga dapat dikatakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut berdasarkan undang-undang (Mardiasmo, 2011:1).

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua fungsi berdasarkan pemungutannya, yaitu (Wardhono, dkk., 2012):

- a. Fungsi Budgeter, merupakan salah satu fungsi pajak yang umumnya dilakukan pada sektor publik dan dalam fungsi ini pajak merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.
- b. Fungsi Pengaturan, merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar sektor keuangan negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

### 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:2) mengungkapkan bahwa agar pemungutan pajak tidak terjadi hambatan, maka dalam pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Syarat keadilan atau pemungutan pajak harus adil  
Adil dalam memungut pajak dengan cara mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Maka dari itu, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding pada Majelis Pertimbangan Pajak
- b. Syarat yuridis atau pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku  
Pajak telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, sehingga dapat memberikan jaminan hukum kepada masyarakat dan Negara agar tercipta keadilan
- c. Syarat ekonomi atau pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian  
Dalam melakukan pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelangsungan proses operasional dan produksi serta perdagangan sehingga tidak terjadi kelesuan perekonomian di masyarakat
- d. Syarat finansial atau pemungutan pajak harus efisien  
Biaya pemungutan pajak sebisa mungkin ditekan agar lebih rendah dari hasil pemungutannya sesuai konsep *budgetary*
- e. Pemungutan pajak harus sederhana  
Dengan melaksanakan pemungutan secara sederhana, maka akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

### 2.1.4.1 Pengertian

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

### 2.1.4.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2004 berisi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dasar hukum dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan pada Kabupaten/Kota dimaksud (Siahaan, 2010:555). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat beberapa perbedaan pada jenis pajak daerahnya yaitu seperti yang tercantum pada tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No. 34 Tahun 2000**  
**dan UU No. 28 Tahun 2009**

UU No. 34 Tahun 2000	UU No. 28 Tahun 2009
1. Pajak Hotel	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran	2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame	4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir	6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur)
	8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov)
	9. Pajak Sarang Burung Walet (baru)
	10. PBB Perdesaan & Perkotaan (baru)
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru)

*Sumber: Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai  
Pajak Daerah” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011*

#### 2.1.4.3 Objek Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bangunan yang dimaksud di sini berupa jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan

seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; jalan tol; pagar mewah; kolam renang; tempat olah raga; dermaga; taman mewah; kilang minyak, air dan gas, dan pipa minyak; serta menara.

#### 2.1.4.4 Objek Pajak Tidak Kena Pajak (OPTKP)

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan beberapa objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Objek pajak yang dimaksud adalah yang:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### 2.1.4.5 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, NJOP merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tiga tahun, kecuali objek

pajak tertentu penetapannya bisa dilakukan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Sedangkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Hal-hal lebih lanjut mengenai Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

#### 2.1.4.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### 2.1.4.7 Tarif Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Hal-hal terkait tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

#### 2.1.4.8 Perhitungan Besaran Pokok PBB-P2

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan cara menghitung besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang yaitu dengan mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, atau dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PBBP2 terutang} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

## 2.2 Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber Pendapatan Daerah menurut undang-undang tersebut meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, PBB-P2 termasuk dalam pajak daerah.

- 2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil sendiri terdiri dari beberapa sumber yaitu dana bagi hasil pajak dan bukan pajak/sumber daya alam. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, PBB lima sektor termasuk dalam dana bagi hasil pajak. Dana alokasi umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang. Dana alokasi khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional yang

dikoordinasikan dengan Gubernur dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu yang dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan.

### 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti pengalokasian dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom.

## 2.3 Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi (2015:6-14), pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai kesuksesan suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan salah satu bagian yang penting dari proses pengendalian manajemen. Dengan mengukur kinerja, organisasi dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, memperbaiki kinerja periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*, memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik. Sehingga, pengukuran kinerja Dinas Pendapatan, yaitu pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah, perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian, yang bermanfaat untuk Dinas Pendapatan di masa mendatang. Mengukur kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memperhitungkan rasio efisiensi dan rasio

efektivitas. Selain itu, memperhitungkan kontribusi suatu komponen pendapatan terhadap total pendapatan juga perlu dilakukan untuk melihat proporsinya terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima organisasi.

## 2.4 Efisiensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisien adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Menurut Bayangkara (2014:13), efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan. Efisiensi juga dapat dikatakan sebagai suatu ukuran proses yang dapat dinilai dari penggunaan input (biaya dan sumber daya) tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan yang dilakukan. Sehingga efisiensi yang dimaksud adalah perbandingan antara penggunaan input (biaya), untuk proses pemungutan PBB-P2, dengan realisasi penerimaan PBB-P2, yang dapat ditulis dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan PBBP2}}{\text{Realisasi penerimaan PBBP2}} \times 100\%$$

*Sumber: Halim (2012: L-7)*

Input dari proses pemungutan PBB-P2 ini adalah biaya pemungutan atau Biaya Operasional Pemungutan (BOP) dan outputnya adalah realisasi penerimaan PBB-P2. Menurut Mahmudi (2015:111), perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut:

- a. Prosentase yang dicapai kurang dari 90% dinilai sangat efisien
- b. Prosentase yang dicapai antara 90%-100% dinilai efisien
- c. Prosentase yang dicapai 100% dinilai cukup efisien
- d. Prosentase yang dicapai lebih dari 100% dinilai tidak efisien.

Jika prosentase yang dicapai semakin besar, maka dapat diartikan bahwa semakin tidak efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan, dan sebaliknya jika prosentase

yang dicapai semakin kecil, maka semakin efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan. Pencapaian efisiensi suatu organisasi atau program atau kegiatan harus dilakukan tanpa mengabaikan tujuan organisasi. Untuk mencapai efisiensi, perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus.

## 2.5 Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Menurut Bayangkara (2014:14), pengertian efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga dapat dikatakan, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh organisasi, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, atau merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PBB-P2 dengan target penerimaan PBB-P2, yang dapat ditulis dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBBP2}}{\text{Target penerimaan PBBP2}} \times 100\%$$

*Sumber: Halim (2012:L-6)*

Rumus tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PBB-P2 yang telah direncanakan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mahmudi (2015:111), tingkat efektivitas dapat dikategorikan dengan kriteria berikut:

- a. Tingkat pencapaian di atas/sama dengan 100% berarti efektif
- b. Tingkat pencapaian diantara 85%-99% berarti cukup efektif
- c. Tingkat pencapaian diantara 65%-84% berarti kurang efektif
- d. Tingkat pencapaian dibawah/sama dengan 65% berarti tidak efektif.

Jika prosentase yang dicapai semakin besar, maka dapat diartikan bahwa semakin efektif suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan, dan sebaliknya jika prosentase yang dicapai semakin kecil, maka semakin tidak efektif suatu organisasi atau kegiatan

tersebut berjalan. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2.6 Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan, dan sebagainya) atau sumbangan. Menurut kamus ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh komponen pendapatan terhadap keseluruhan pendapatan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari PBB-P2 dalam penerimaan Pendapatan Daerah. Besarnya kontribusi PBB-P2 ini dapat diketahui dengan membandingkan antara penerimaan PBB-P2 periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Daerah di periode yang sama, yang dapat ditulis dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBBP2}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Rumus tersebut menggambarkan seberapa besar PBB-P2 memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Daerah pada periode tertentu.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu penelitian dari Pradita, dkk (2014) yang meneliti tentang “Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya” dan hasilnya pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya menunjukkan kriteria yang cukup efektif dengan menggunakan lima aspek penilaian yaitu hasil, keadilan, daya guna ekonomi,

kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Hasil lainnya yaitu kontribusi penerimaan PBB Perkotaan terhadap realisasi PAD Kota Surabaya termasuk dalam kriteria sedang yang ditunjukkan dengan terjadinya penurunan prosentase kontribusi PBB perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya dari tahun 2011-2013 dan peningkatan realisasi penerimaan PBB Perkotaan setiap tahunnya dari tahun 2011-2013 yang diikuti peningkatan penerimaan PAD Kota Surabaya.

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Adelina (2013) yang meneliti tentang “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik”. Hasil penelitian tersebut adalah tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik tahun 2007-2011 menunjukkan kriteria sangat efektif dengan persentase lebih dari 100%, serta tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik dari tahun 2007-2011 termasuk dalam kriteria sangat kurang dengan persentase kurang dari 10%.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Nurmalasari (2014) yang meneliti tentang “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan Pengelolaan serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah”. Objek penelitian tersebut adalah Dinas Pendapatan Kota Mataram. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Mataram dari tahun 2009-2013 menunjukkan kriteria sangat efektif, meskipun terjadi fluktuasi terlihat dari adanya peningkatan yang signifikan dari tahun 2009-2012, namun pada tahun 2013, setelah pemerintah Kota Mataram melakukan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah, mengalami penurunan nominal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya tindakan langsung yang dilakukan pihak terkait mengenai pemutakhiran data untuk menggali potensi Wajib Pajak yang ada dan sedang adanya renovasi gedung Dinas Pendapatan. Hasil lainnya adalah kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2009-2010 mengalami kenaikan sebesar 6,55, sedangkan dari tahun 2010-2011 mengalami penurunan dua kali lipat dari kenaikan tahun 2009 yaitu sebesar 13,98. Kemudian dari tahun 2011-2012

mengalami kenaikan hanya sebesar 0,97. Di Kota Mataram, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan berada pada posisi ketiga, setelah BPHTB dan pajak hotel.

Damaiyanti, dkk (2014) melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2009 sampai dengan 2013 dikatakan sangat efektif dengan presentase melebihi dari 100 persen dan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009 sampai dengan 2013 dikatakan kurang dengan presentase dibawah 50 persen. Kemudian Prathiwi, dkk (2015) juga melakukan penelitian mengenai “Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014” yang hasilnya menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 Kota Denpasar tergolong sangat efektif. Hal ini dilihat dari rasio yang berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melampaui dari yang telah ditargetkan sebelumnya.

Pertiwi, dkk (2014) melakukan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”. Hasil penelitian tersebut yaitu Efektivitas pemungutan PBB di Kota Probolinggo secara keseluruhan ini kurang efektif, karena selama 6 tahun dari tahun 2008-2013 belum pernah mencapai target penerimaan yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan terendah pada tahun 2010 sebesar Rp 4.037.443.280,00 dan tingkat efektivitasnya 72,12% dengan kriteria kurang efektif. Sedangkan realisasi penerimaan tertinggi pada tahun 2013 sebesar Rp 4.716.360.032,00 dan tingkat efektivitasnya 83,48% dengan kriteria cukup efektif. Kenaikan penerimaan PBB pada tahun 2013 dikarenakan pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah. Rata-rata efektivitas penerimaan PBB secara keseluruhan sebesar 78,32% dengan kriteria kurang efektif.

## **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yang menurut Indriantoro dkk. (2014:12) merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian kuantitatif dalam melakukan penelitian harus objektif untuk mewujudkan objektivitas penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Dalam metode deskriptif, peneliti dapat membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga dapat dikatakan studi komparatif.

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember karena peneliti melihat potensi yang cukup besar dari Kabupaten Jember dalam penerimaan PBB-P2. Seperti yang diungkapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember bahwa sebelum pengalihan pengelolaan PBB-P2, potensi PBB-P2 Jember yang dapat dikelola pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp 26 milyar setiap tahun. Namun setelah dianalisis bersama konsultan terjadi peningkatan menjadi Rp 60 milyar, lalu setelah pemutakhiran data dilaksanakan terjadi penurunan menjadi Rp 50 milyar. Namun Pemerintah Kabupaten Jember tetap optimis PBB-P2 merupakan andalan untuk mencapai target PAD tahun 2014 (sumber: [www.jemberpost.com](http://www.jemberpost.com)). Hal itu membuktikan bahwa Kabupaten Jember berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dari penerimaan PBB-P2 yang juga akan meningkatkan Pendapatan Daerah, karena terlihat banyaknya pemukiman dan industri yang ada, baik di perdesaan maupun perkotaan. Selain itu, Kabupaten Jember baru melaksanakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah pada tahun 2013, sehingga dapat dilihat perbandingannya dengan sebelum pengalihan.

### 3.3 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yaitu efisiensi, efektivitas, dan kontribusi. Hal tersebut dikarenakan ketiga variable tersebut dapat mencerminkan kinerja, proses dan hasil dari penerimaan PBB-P2. Rentang waktu yang diteliti yaitu empat tahun terakhir (dari tahun 2011 sampai 2014), karena ingin mengetahui bagaimana efisiensi dan efektivitas penerimaan PBB-P2 serta kontribusinya pada Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebelum dan setelah diterapkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengenai pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Kabupaten Jember menyatakan siap menerapkannya pada tahun 2013.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subjek dan data dokumenter. Menurut Indriantoro dkk. (2014:145), data subjek adalah data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Data dokumenter adalah data penelitian yang memuat informasi mengenai suatu subjek, objek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat dan disusun dalam arsip.

Pada penelitian ini, sumber datanya meliputi:

- 1) Data primer, adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian (Indriantoro dkk., 2014:146). Terkait penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
- 2) Data Sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (Indriantoro dkk., 2014:147). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian

ini terdiri dari data eksternal (Profil Kabupaten Jember) dan data internal (data Biaya Pemungutan/Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2011-2014, data Realisasi PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2011-2014, serta Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2014).

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu metode survei dengan melakukan wawancara. Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah metode penelusuran. Metode penelusuran dapat dilakukan secara manual (untuk data dalam format kertas hasil cetakan) dan dengan menggunakan komputer (untuk data dalam format elektronik) (Indriantoro dkk., 2014:151).

### 3.6 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel, yaitu:

a. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara penggunaan input (biaya), untuk proses pemungutan PBB-P2, dengan realisasi penerimaan PBB-P2, yang dapat ditulis dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan PBBP2}}{\text{Realisasi penerimaan PBBP2}} \times 100\%$$

*Sumber: Halim (2012: L-7)*

Biaya pemungutan/Biaya Operasional Pemungutan (BOP) PBB-P2 maksudnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Jember dalam proses pemungutan PBB-P2 pada periode tertentu. Sedangkan realisasi penerimaan PBB-P2 maksudnya adalah besarnya penerimaan PBB-P2 yang

diterima Kabupaten Jember pada periode tertentu. Menurut Mahmudi (2015:111), perhitungan tingkat efisiensi tersebut dapat dinilai dengan kriteria berikut:

- 1) Prosentase yang dicapai kurang dari 90% dinilai sangat efisien
- 2) Prosentase yang dicapai antara 90%-100% dinilai efisien
- 3) Prosentase yang dicapai 100% dinilai cukup efisien
- 4) Prosentase yang dicapai lebih dari 100% dinilai tidak efisien.

b. Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara target penerimaan PBB-P2 dengan realisasi penerimaan PBB-P2, yang dapat ditulis dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBBP2}}{\text{Target penerimaan PBBP2}} \times 100\%$$

*Sumber: Halim (2012:L-6)*

Target penerimaan PBB-P2 maksudnya adalah besarnya rencana penerimaan PBB-P2 yang akan diterima Kabupaten Jember pada periode tertentu. Rumus tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PBB-P2 yang telah direncanakan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mahmudi (2015:111), tingkat efektivitas PBB-P2 dapat dikategorikan dengan kriteria berikut:

- 1) Tingkat pencapaian di atas/sama dengan 100% berarti efektif
- 2) Tingkat pencapaian diantara 85%-99% berarti cukup efektif
- 3) Tingkat pencapaian diantara 65%-84% berarti kurang efektif
- 4) Tingkat pencapaian dibawah/sama dengan 65% berarti tidak efektif.

c. Kontribusi

Kontribusi merupakan perbandingan antara total realisasi penerimaan PBB-P2 dengan total realisasi penerimaan Pendapatan Daerah suatu daerah pada periode tertentu, yang dapat ditulis dengan rumus:

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBBP2}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Rumus tersebut menggambarkan sejauh mana PBB-P2 memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Daerah suatu daerah pada periode tertentu.

### 3.7 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, terdapat empat poin pembahasan, yaitu:

1. Gambaran Umum

Gambaran umum berisi profil Kabupaten Jember, gambaran singkat pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah, serta gambaran singkat perbedaan pengelolaan sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, yang dilakukan dengan cara penelusuran pustaka dan wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

2. Menyajikan data penelitian yang meliputi data biaya pemungutan PBB-P2, data target dan realisasi penerimaan PBB-P2, serta realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2014.

3. Menentukan tingkat, rata-rata sebelum dan sesudah pengalihan, perubahan setiap tahun, dan trend dari efisiensi, efektivitas, dan kontribusi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2011-2014.

- a. Untuk mengetahui efisiensi penerimaan PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menyiapkan data-data yang dibutuhkan seperti data biaya pemungutan PBB-P2, data realisasi PBB-P2, serta laporan target dan realisasi penerimaan PBB-P2/APBD Kabupaten Jember tahun 2011-2014.

- 2) Menginput data yang diperoleh ke dalam tabel dengan menggunakan MS Excel

- 3) Menghitung tingkat efisiensi dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pemungutan PBBP2}}{\text{Realisasi penerimaan PBBP2}} \times 100\%$$

Dalam menghitung tingkat efisiensi dapat langsung dilakukan dengan MS Excel, dengan cara menuliskan formula rumus tersebut pada sel yang telah disediakan. Selanjutnya kolom keterangan diisi menyesuaikan dengan besarnya tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2. Kemudian, menghitung rata-rata sebelum dan sesudah pengalihan serta persentase perubahan tingkat efisiensi.

- 4) Menentukan trend efisiensi penerimaan PBB-P2 selama empat tahun dengan menggunakan MS Excel yang disajikan dalam bentuk grafik. Dimana analisis trend merupakan gerakan yang berjangka panjang, lamban dan berkecenderungan menuju ke satu arah, naik atau turun.
  - 5) Menjelaskan hasil perhitungan efisiensi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dalam bentuk deskriptif.
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara yang hampir sama, yaitu:
- 1) Menyiapkan data-data yang dibutuhkan yaitu data realisasi PBB-P2 dan laporan target dan realisasi penerimaan PBB-P2/APBD Kabupaten Jember tahun 2011-2014.
  - 2) Menginput data yang diperoleh ke dalam tabel dengan menggunakan MS Excel
  - 3) Menghitung tingkat efektivitas dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBBP2}}{\text{Target penerimaan PBBP2}} \times 100\%$$

Dalam menghitung tingkat efektivitas dapat langsung dilakukan dengan MS Excel, dengan cara menuliskan formula rumus tersebut pada sel yang telah disediakan. Selanjutnya kolom keterangan diisi menyesuaikan dengan besarnya tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2. Kemudian,

menghitung rata-rata sebelum dan sesudah pengalihan serta persentase perubahan tingkat efektivitas.

- 4) Menentukan trend efektivitas penerimaan PBB-P2 selama empat tahun dengan menggunakan MS Excel yang disajikan dalam bentuk grafik.
- 5) Menjelaskan hasil perhitungan efektivitas penerimaan PBB-P2 dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dalam bentuk deskriptif.

c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menyiapkan data-data yang dibutuhkan yaitu data realisasi PBB-P2 dan laporan target dan realisasi penerimaan PBB-P2/APBD Kabupaten Jember tahun 2011-2014.
- 2) Menginput data yang diperoleh ke dalam tabel dengan menggunakan MS Excel
- 3) Menghitung kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBBP2}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Dalam menghitung besarnya kontribusi dapat langsung dilakukan dengan MS Excel, dengan cara menuliskan formula rumus tersebut pada sel yang telah disediakan. Selanjutnya kolom keterangan diisi menyesuaikan dengan besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah. Kemudian, menghitung rata-rata sebelum dan sesudah pengalihan serta persentase perubahan tingkat kontribusinya.

- 6) Menentukan trend kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah selama empat tahun dengan menggunakan MS Excel yang disajikan dalam bentuk grafik.
- 7) Menjelaskan hasil perhitungan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dalam bentuk deskriptif.

4. Melakukan pembahasan analisis efisiensi, efektivitas, dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah dengan menambahkan hasil wawancara untuk menjelaskan penyebabnya.



## BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- 1) Tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2011-2014 secara keseluruhan menunjukkan kriteria sangat efisien, yang berarti bahwa Kabupaten Jember telah optimal dalam memanfaatkan biaya pemungutan dengan jumlah tertentu untuk menghasilkan penerimaan dari PBB-P2. Trend/kecenderungan efisiensi penerimaan PBB-P2 adalah turun dari tahun 2011 sampai tahun 2014, yang berarti semakin baik. Kemudian, pengelolaan PBB-P2 setelah pengalihan lebih efisien daripada sebelum pengalihan.
- 2) Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Jember tahun 2011 menunjukkan tidak efektif, tahun 2012 dan 2014 menunjukkan kurang efektif, tahun 2013 (saat pengalihan) menunjukkan cukup efektif, yang berarti bahwa Kabupaten Jember belum maksimal dalam usaha mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, trend/kecenderungan efektivitas penerimaan PBB-P2 adalah naik dari tahun 2011 sampai tahun 2014, yang berarti semakin baik. Kemudian, pengelolaan PBB-P2 setelah pengalihan lebih efektif daripada sebelum pengalihan.
- 3) Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2011-2014 secara keseluruhan dapat dikatakan kecil, yang berarti bahwa kontribusi PBB-P2 sangat kecil pada total penerimaan daerah Kabupaten Jember. Meskipun begitu, trend/kecenderungan kontribusinya adalah naik dari tahun 2011 sampai tahun 2014, yang berarti bahwa kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah terus meningkat. Kemudian, kontribusi PBB-P2 setelah pengalihan lebih besar daripada sebelum pengalihan.

## 5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah

- 1) Penelitian ini dilakukan hanya pada satu daerah, yaitu Kabupaten Jember
- 2) Rentang waktu yang dipilih kurang panjang, yaitu hanya empat tahun terakhir. Sehingga kurang akurat apabila dilakukan estimasi atau peramalan di masa depan.
- 3) Metode yang digunakan dalam penelitian ini masih menggunakan analisis trend. Sehingga penelitian ini hanya dilihat dari hasil.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Objek Penelitian
  - a. Agar efisiensi pengelolaan PBB-P2 dapat secara konsisten dipertahankan, perlu selalu dilakukan pengawasan dan pengevaluasian di berbagai seksi/divisi, serta selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak.
  - b. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PBB-P2, dapat dilakukan beberapa upaya perbaikan seperti mengevaluasi atau melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja pengelolaan dan penambahan SDM baru yang kompeten untuk pengelolaan PBB-P2, meningkatkan kompetensi dan motivasi SDM yang setelah dievaluasi belum maksimal, serta lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang membuat efek jera dan menambah tempat pembayaran yang dapat disetor langsung oleh wajib pajak seperti mobil keliling PBB.
  - c. Untuk terus meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah atau yang lebih spesifik terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan beberapa perbaikan terkait pengoptimalan penerimaan PBB-

P2, seperti menambah sarana prasarana atau fasilitas pemungutan (misalnya teknologi) dan menambah mitra untuk bekerjasama (perluasan tempat pembayaran PBB-P2, tidak hanya di Bank Jatim saja).

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah lokasi penelitian, tidak hanya di satu daerah, misalnya wilayah Jawa Timur. Sehingga dapat dilihat dan dibandingkan hasilnya dengan kota/kabupaten lain se-Jawa Timur, misalnya Eks Karesidenan Besuki (Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi).
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah rentang waktunya, misalnya 10 tahun. Semakin panjang rentang waktu yang digunakan, maka semakin akurat bila dilakukan peramalan.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti dengan metode analisis yang berbeda atau dengan metode penilaian kinerja yang berbeda, agar dapat dinilai dari banyak faktor, seperti dari segi pelayanannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adelina, Rima. 2013. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Volume 1 No. 3. Halaman 1-20.
- Bayangkara, IDK. 2014. *Audit Manajemen: Prosedur dan Implementasi Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Salemba Empat.
- Damaiyanti, N. P. D., dkk. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 9, No. 1. Halaman 97-105.
- Halim, A., Syam K, M. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur., dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama Cetakan Keenam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Kustono, Alwan Sri, 2010. *Akuntansi Keperilakuan Riset Empirik dan Tinjauan Teoritik*. Surabaya: Litera Media Center (LMC).
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Nordiawan, Deddi., dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurmalasari, Rany. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pelayanan Pengalihan Pengelolaan serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Mataram)*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang.

Pemerintah Kabupaten Jember Bagian Humas. *Profil & Potensi Kabupaten Jember*.  
Jember: Pemerintah Kabupaten Jember Bagian Humas.

Pertiwi, Rizka. N., dkk. 2014. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)*. Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya. Volume 3, No. 1.

Pradita, F. D., dkk. 2014. *Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*. Student Journal Universitas Brawijaya Malang. Volume 3, No. 1.

Prathiwi, I. A. M. A., dkk. 2015. *Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014*. Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3, No. 1.

Siahaan, P. Mariot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suryanto. 2014. *Implementasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Daerah Untuk Memperkuat Desentralisasi Fiskal*. Bunga Rampai Administrasi Publik. Halaman 73-97.

Wardhono, A., dkk. 2012. *Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember*. Jurnal TI Undip. Volume VII. No 2.

-----Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

-----Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

-----Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

-----Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

-----Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

-----Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. 2012. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah. <http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan?lang=en> [diakses tanggal 15 Maret 2015].

Sal. 2014. Dispenda Akan Kerja Keras Capai Target PBB. <http://www.jemberpost.com/berita-utama/dispanda-akan-kerja-keras-capai-target-pbb/> [diakses tanggal 10 September 2015].

**LAMPIRAN 1 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Perbedaan sebelum sama sesudah pengalihan apa saja Pak?
2. Bagaimana menetapkan besarnya biaya pemungutan PBB-P2?
3. Menurut hasil perhitungan, tingkat efisiensi sebelum dan sesudah menurun, dimana semakin kecil tingkat efisiensi semakin bagus, dan secara keseluruhan tergolong “sangat efektif”.  
Menurut Bapak hal itu disebabkan oleh apa / faktor-faktor apa yang mempengaruhi efisiensi penerimaan PBB-P2?
4. Menurut hasil perhitungan, tingkat efektivitas sebelum dan sesudah naik tetapi masih tergolong kurang, dimana dari 2011-2014 terus naik dan di tahun 2013 terjadi kenaikan yang signifikan. Semakin tinggi tingkat efektivitas semakin baik.  
Menurut Bapak hal itu disebabkan oleh apa / faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PBB-P2?
5. Apakah ada sanksi untuk kecurangan-kecurangan yang terjadi Pak?
6. Pengawasan dilakukan oleh siapa Pak?

**LAMPIRAN 2 HASIL WAWANCARA**

Nama : Bapak Hendra  
Jabatan : Kasie Penagihan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember  
Hari, Tanggal : Senin, 14 Desember 2015  
Tempat : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

***1. Perbedaan proses pemungutan sebelum sama sesudah pengalihan apa saja Pak?***

Jawab:

“Kalau dulu semuanya dari KPP, kita hanya terima SPPT dari KPP, kita yang ngirim, kita yang mungut. Semua permasalahan dan lain sebagainya biaya pemungutan juga KPP semua. Kalau sekarang kita mulai dari mendata, menerbitkan, menagih, sampai ke mengatasi permasalahan dan pelaporan dinas semua. Jadi disitu perbedaannya.”

***2. Bagaimana menetapkan besarnya biaya pemungutan PBB-P2 sebelum dan sesudah pengalihan?***

Jawab:

“Untuk BOP, sebelum pengalihan ditetapkan oleh pusat sebesar 9%, dan setiap bulan sebelum dibagikan, kita harus rekon dulu ke Surabaya. Karena melibatkan beberapa pihak baik KPP, Pemprov Jatim, dan Pemkab. Setelah itu, (tahun 2013) dihitung per lembar SPPT yang diterima. Misalkan kelurahan Sumbersari SPPT nya 30 ribu itu dikalikan 2500 jadi 60 juta. Kalau sekarang menggunakan persentase mulai 2014. Ini BOP untuk tim desa/kelurahan dan tim kecamatan. Sekarang untuk desa/kelurahan itu 5%. Jadi misalkan bakunya satu milyar, dia dapat BOP untuk pemungutannya itu 50 juta. Sedangkan untuk kecamatan ini 1% dari target kecamatan, jadi kalau targetnya 7 milyar dia dapat 70 juta. Kalau dulu pusat menentukan biaya pemungutan nggak ada indikator kinerjanya, pokok kamu realisasinya sekian dikasih 9%. Kalau sekarang, ada tahapan-tahapan. Tahap pertama 25%, tahap kedua 50%, tahap ketiga 75%, tahap keempat 100%. Jadi untuk

memacu kinerja itu, BOP diberikan kalau realisasinya sudah mencapai tahapan. Tahap pertama misalkan Bulan Mei sudah sampai 50%, jadi dua tahap langsung kita cairkan. Mei cuma 25%, cuma satu tahap. Mei dapat 100%, ya kita berikan semua. Jadi nggak bareng. Semakin cepat realisasinya, semakin cepat pencairan BOP nya.”

**3. Mengenai insentif yang diberikan ke petugas pemungut, besarnya ditetapkan berapa?**

Jawab:

“Untuk besarnya kita mengacu ke SK Bupati yang tiap tahun berubah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Pemberian insentif pun diberikan sesuai tahapan”

**4. Menurut hasil perhitungan, tingkat efisiensi sebelum dan sesudah menurun, dimana semakin kecil tingkat efisiensi semakin bagus, dan secara keseluruhan tergolong “sangat efektif”.**

**Menurut Bapak hal itu disebabkan oleh apa/faktor-faktor apa yang mempengaruhi efisiensi penerimaan PBB-P2?**

Jawab:

“Kalau dilihat dari biaya pemungutannya, selama ini kan (sebelum pengalihan) mereka kerja itu berapapun dapat uang, kalau kita kan (setelah pengalihan) enggak karena semua berbasis kinerja. Kita pola, pemberian Biaya Operasional Pemungutan kepada petugas di wilayah itu harus mencapai kinerja tertentu. Tahapan-tahapan itu mulai dari 25%, 50%, 75%, sama 100%. Jadi setiap tahapan itu mereka berhak kita usulkan pencairan Biaya Operasional Pemungutan. Jadi misalkan targetnya 100 juta, dia merealisasikan 25 juta dulu baru bisa mencairkan tahap pertama. Tapi itu tidak kaku, jadi misalkan dia dibagi sekarang SPPT nya Bulan Maret, Bulan Maret itu juga lunas ya langsung kita berikan 100%. Jadi siapa cepat, dia dapatnya juga cepat. Terus selain itu juga, kita tambahkan yang lunas di bulan-bulan tertentu kita berikan hadiah memang, penghargaan untuk mereka yang berprestasi kan. Jadi misalkan Bulan Agustus dia lunas, dia dapat sekian persen dari totalnya. Misalkan pokok ketetapannya 100 juta satu desa itu, Bulan Agustus dia

lunas, misalkan rewardnya 8%, jadi dia dapat 8 juta rewardnya tok itu, selain biaya pemungutan. Cuma beberapa tahun ini serapannya minim. Jadi nggak terlalu banyak desa yang dapat *reward*, karena pelunasan kita batasi di bulan tertentu aja sebelum jatuh tempo. Paling lambat biasanya Bulan Oktober itu yang terakhir mendapat *reward*, pelunasan setelah bulan itu kita nggak beri *reward*. Lah sedangkan jamannya KPP dulu tidak pengaruh dia realisasinya berapapun tetap dicairkan. Ya memang kita jadi terkesan tidak adil. Mereka mungut dapat 10% pun tapi kan mereka kerja sebenarnya. Cuma kan ya kita punya target juga, ya sama mereka juga punya target. Jadi kita bebaskan pada mereka target-target itu. Itu yang terkait efisiensi. Kalau dulu kita ketat, BOP-BOP yang tidak memenuhi target ya hangus. Setelah lewat tahun anggaran ya kita nggak berikan lagi. Cuma akhir-akhir ini kita agak longgar. Jadi yang diatas 50%, pencairan realisasi tahap 2 telah diberikan misalnya, terus dia sampai Bulan Maret itu masih bisa 65%, 15% BOP sisanya itu kita berikan. Cuma kita batasi Bulan Maret tahun berikutnya. Sedangkan dulu waktunya KPP nggak ada kayak gitu, ya berapapun realisasinya tetep diberikan (biaya pemungutannya).”

- 5. Menurut hasil perhitungan, tingkat efektivitas sebelum dan sesudah naik tetapi masih tergolong kurang, dimana dari 2011-2014 terus naik dan di tahun 2013 terjadi kenaikan yang signifikan. Semakin tinggi tingkat efektivitas semakin baik. Menurut Bapak hal itu disebabkan oleh apa/faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PBB-P2?***

Jawab:

“Sebenarnya ada faktor internal dan eksternal. Jadi kalau internal ini dari Dinas Pendapatan sendiri ya keterbatasan personil, makanya kita sampai melibatkan Desa dan Kelurahan. Logikanya sebenarnya kalau bisa sih kita semua yang nangani. Cuma kalau dari internal rata-rata kita bisa tanggulangi lah. Yang banyak itu dari eksternal, mulai kinerja petugas dibawah itu juga berpengaruh. Dan itu sendiri juga dipengaruhi banyak faktor juga, ada yang karena SDM nggak mampu, ada yang karena kinerja sudah titik jenuh jadi kurang bagus, ada juga faktor politik, jadi

kepemimpinan itu penting. Jaman Pak Jalal masih aktif, target PAD 500 Milyar waktu itu. Otomatis semua SKPD digenjot untuk penerimaannya, termasuk kita rutin ngadakan evaluasi ke desa yang persentasenya dibawah. Lurahny/camatnya suruh berdiri kalau realisasinya kecil. Memang bukan Pak Bupati sendiri yang mengevaluasi, biasanya Pak Wakil atau Pak Sekda. Cuma itu efektif. Selain itu juga adanya persyaratan pencairan Realisasi Dana Desa juga itu dulu dikaitkan dengan PBB. Kita dulu diberi kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi, kaitan capaian realisasi. Jadi misalkan desa pembangunannya sekian, realisasinya masih dibawah, nggak bisa mencairkan. Jadi desa juga realisasinya harus digenjot. Banyak desa yang nggak bisa mencairkan. Kalo top manajernya kenceng ya otomatis pengaruh pada kinerja semuanya. Pemungutan itu kan ada kelembagaanya, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan. Jadi masing-masing kelembagaan itu ada penanggungjawabnya sendiri. Nah yang selama ini nggak berjalan dengan baik itu di tingkat kecamatan, cuma beberapa yang mengoptimalkan timnya. Terus kalau ditingkat desa, kadang-kadang petugasnya nggak jalan. Banyak faktor sih. Cuma memang tahun sekarang ini kita agak longgar karena juga top manajernya nggak ada. Akhirnya nggak pernah ada rapat, terus kita mau mengadakan evaluasi, kita mau turun, takut disangka yang macam-macam. Akhirnya pengaruh sih kesemuanya. Dan tidak menutup kemungkinan banyak penyalahgunaan juga. Banyak kasus yang nggak disetor ke petugas dinas atau ke Bank Jatim. Akhirnya wajib pajak tercatat belum bayar, padahal realitanya dia sudah bayar. Saya yakin kok masyarakat nggak mungkin nggak bayar, paling yang bandel hanya satu dua aja. Cuma kita nggak punya instrumen sampai kesana, karena juga momennya nggak enak sekarang. Ya nggak tahu tahun 2016 barangkali mungkin bisa lebih baik lagi. Sepanjang saya duduk disini penerimaan paling buruk tahun 2015 ini. Biasanya kalau tidak dikaitkan dengan pencairan Dana Desa, saya memperhatikan dari tahun ke tahun itu realisasi kita bisa sampai 70%. Nah sekarang dengan dipegang dinas, kita sudah mensyaratkan dipelayanan dan segala macam, masih dibawah 60% untuk akhir Bulan Oktober 2015.”

**6. Apakah ada sanksi untuk kecurangan-kecurangan yang terjadi pak?**

Jawab:

“Mengenai kecurangan dibawah itu sebenarnya ada sanksi. Kadang-kadang kita masih berusaha persuasif. Kalau yang saya temukan, rata-rata mereka menyelesaikan, entah dengan cara diangsur atau langsung dibayar *cash*. Kalau jumlahnya besar biasanya diangsur. Masalahnya kalau kita limpahkan ke kepolisian pasti masuk penjara itu. Jadi kita nggak sampai hati juga. Biasanya kita takut-takuti, kita periksa aja mereka udah takut.”

**7. Pengawasan dilakukan oleh siapa Pak?**

Jawab:

“Kalau pengawasan dulu bagian saya, masuk di penagihan. Tapi mulai 2015, pengawasan sudah dibentuk seksi sendiri. Jadi dia rutin ngadakan evaluasi tiap 3 bulan. Kalau saya dulu gini, evaluasi nggak perlu semua lah, kan kelihatan dari data yang masuk itu mana yang jelek itu aja kan. Kalau yang bagus kita panggil juga ngapain. Jadi kalau saya dulu kita datangi desa yang minim, ya itu diplomatis ya bagaimana caranya, apa setengah ditakut-takutin, setengah persuasif. Cuma desa tertentu itu memang agak sulit kadang, jadi harus ditekan. Tapi biasanya kita evaluasi, kita cek pembukuannya aja, nggak usah nunggu besok mereka sudah bayar duluan biasanya. Mulai tahun 2015, kita kirim surat tagihan untuk melunasi tunggakan-tunggakan. Karena setiap tahun kan kita di audit BPK itu kan piutangnya yang diaudit. Kita pakai strata dengan menggunakan aplikasi, jadi kalau kita terbitkan surat tagihan semua kan nggak mungkin dengan biaya yang besar. Selain menagih juga sekalian identifikasi objek dan subjek pajak, tidak menutup kemungkinan objek maupun subjek pajak itu bermasalah. Dari situ nanti kita tandai lewat aplikasi itu kita punya database, dari sekian itu yang bermasalah sekian, akhirnya bisa ketemu piutang riilnya berapa. Karena data yang dari KPP tidak semuanya data valid.”

**LAMPIRAN 3****Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  
(PBB-P2) Kabupaten Jember Tahun 2011-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Biaya Operasional Pemungutan</b>	
2011	Rp	1.495.143.669,06
2012	Rp	1.535.949.792,18
2013	Rp	1.367.899.500,00
2014	Rp	1.582.639.751,00

## LAMPIRAN 4

**DAFTAR REALISASI PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN TAHUN 2011**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**S/D TANGGAL 26 SEPTEMBER 2013**

NO.	KECAMATAN	B A K U	REALISASI	%	S I S A	KETERANGAN
1	Ambulu	948.104.477	948.104.576	100,00	(99)	Lunas, 26-10-2011
2	Semboro	435.625.484	402.843.645	92,47	32.781.839	
3	Umbulsari	1.134.017.583	1.036.537.170	91,40	97.480.413	
4	Gumukmas	782.126.842	692.965.511	88,60	89.161.331	
5	Rambipuji	749.688.730	626.255.405	83,54	123.433.325	
6	Tanggul	534.745.395	438.077.257	81,92	96.668.138	
7	Kencong	697.205.210	566.932.825	81,32	130.272.385	
8	Balung	855.091.952	691.336.062	80,85	163.755.890	
9	Jombang	601.102.967	466.015.819	77,53	135.087.148	
10	Silo	391.562.164	301.438.551	76,98	90.123.613	
11	Bangsalsari	741.384.929	561.104.312	75,68	180.280.617	
12	Tempurejo	308.191.972	229.957.050	74,61	78.234.922	
13	Jelbuk	222.673.960	156.471.517	70,27	66.202.443	
14	Sumberbaru	574.481.341	402.713.143	70,10	171.768.198	
15	Sumberjambe	435.601.966	298.422.213	68,51	137.179.753	
16	Ledokombo	389.580.595	253.193.055	64,99	136.387.540	
17	Jenggawah	827.313.764	532.054.534	64,31	295.259.230	
18	Wuluhan	995.683.613	639.909.040	64,27	355.774.573	
19	Sukowono	374.098.834	222.491.299	59,47	151.607.535	
20	Kaliwates	4.440.953.108	2.615.682.076	58,90	1.825.271.032	
21	Puger	1.153.937.849	616.315.057	53,41	537.622.792	
22	Patrang	1.593.719.479	847.556.703	53,18	746.162.776	
23	Panti	443.531.019	233.854.869	52,73	209.676.150	
24	Pakusari	445.849.378	232.480.885	52,14	213.368.493	
25	Mayang	423.329.462	211.703.144	50,01	211.626.318	
26	Sumpersari	2.815.628.218	1.346.909.018	47,84	1.468.719.200	
27	Sukorambi	374.982.984	178.658.272	47,64	196.324.712	
28	Kalisat	507.154.026	238.303.347	46,99	268.850.679	
29	Ajung	779.476.137	359.327.328	46,10	420.148.809	
30	Mumbulsari	376.830.962	165.981.003	44,05	210.849.959	
31	Arjasa	291.113.241	99.112.748	34,05	192.000.493	
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.644.787.641</b>	<b>16.612.707.434</b>	<b>64,78</b>	<b>9.032.080.207</b>	

Jember, 26 September 2013

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER

**Drs. SUPRAPTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610721 198603 1 011

LAMPIRAN 5

**DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**  
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

**DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
 APBD KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2011  
 S/D TANGGAL 31 Desember 2011**

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4		PENDAPATAN DAERAH	1.854.048.009.772,32	1.878.188.638.068,64	204.095.148.540,15	1.982.283.782.606,79	101,52	
4 1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	172.299.295.701,32	168.000.444.973,64	24.493.945.185,15	182.494.390.158,79	105,92	
4 1 1		NASIL PAJAK DAERAH	35.637.446.000,00	36.377.565.130,80	4.331.408.264,00	40.708.973.394,50	114,23	
1 4 1 1 01		Pajak Hotel						DIPENDA
4 1 1 01 04		- Hotel Bintang Tiga	270.000.000,00	294.930.606,00	21.324.620,00	316.255.426,00	117,13	
4 1 1 01 06		- Hotel Bintang Satu	130.000.000,00	158.672.749,00	13.123.850,00	171.796.599,00	132,15	
4 1 1 01 07		- Hotel Melati	700.000.000,00	675.461.492,00	95.073.057,00	770.534.549,00	110,08	
			1.100.000.000,00	1.129.064.847,00	129.521.727,00	1.258.586.574,00	114,42	
2 4 1 1 02		Pajak Restoran						DIPENDA
4 1 1 02 01		- Restoran	650.000.000,00	926.782.198,00	97.443.061,00	1.024.225.259,00	157,57	
4 1 1 02 02		- Rumah Makan	1.992.419.000,00	1.815.361.627,00	164.689.622,00	1.980.051.249,00	99,38	
4 1 1 02 03		- Cafe	20.000.000,00	21.855.832,00	6.103.047,00	27.958.879,00	139,79	
4 1 1 02 05		- Catering	350.000.000,00	739.027.354,00	176.392.668,00	915.420.022,00	261,55	
			3.012.419.000,00	3.503.027.011,00	444.628.398,00	3.947.655.409,00	131,05	
3 4 1 1 03		Pajak Hiburan						DIPENDA
4 1 1 03 01		- Tontonan Film/Bookup/Rental VCD	12.000.000,00	5.818.050,00	648.700,00	6.464.750,00	53,87	
4 1 1 03 02		- Pagarikan Kasenon/Musk/Tari/Musk	120.000.000,00	178.440.112,00	15.382.588,00	193.822.700,00	161,52	
4 1 1 03 10		- Permainan Bilyard	120.000.000,00	8.139.033,00	394.000,00	8.533.033,00	7,11	
4 1 1 03 15		- Permainan Keltengkas	193.027.000,00	339.884.575,00	26.189.700,00	366.074.275,00	189,65	
			445.027.000,00	632.281.770,00	42.612.988,00	674.894.758,00	129,18	
4 4 1 1 04		Pajak Reklame						DIPENDA
4 1 1 04 01		- Reklame Papan/Billboard/Videocon/Megatron	1.200.000.000,00	1.184.395.750,00	136.403.250,00	1.320.799.000,00	110,07	
4 1 1 04 02		- Reklame Kain	720.000.000,00	589.384.587,50	42.761.500,00	632.146.087,50	87,80	
			1.920.000.000,00	1.773.780.337,50	179.164.750,00	1.952.945.087,50	101,72	
5 4 1 1 05		Pajak Penerangan Jalan (PPJ)						PT. PLN
4 1 1 05 01		- Pajak Penerangan Jalas PT. PLN	28.100.000.000,00	27.095.822.130,00	2.361.585.406,00	29.457.407.536,00	104,83	
6 4 1 1 06		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						DIPENDA
4 1 1 06 04		- Batu Kapur	100.000.000,00	119.565.400,00	42.209.000,00	161.874.400,00	161,87	
4 1 1 06 06		- Pasir	105.000.000,00	92.911.180,00	49.000.900,00	141.912.080,00	135,15	
			205.000.000,00	212.676.580,00	91.209.900,00	303.786.480,00	148,19	
7 4 1 1 07		Pajak Parkir						DIPENDA
4 1 1 07 01		- Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 4 1 1 08		Pajak Air Tanah						DIPENDA
4 1 1 08 01		- Pajak Air Tanah	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 4 1 1 13		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						DIPENDA
4 1 1 13 01		- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	750.000.000,00	2.131.012.455,00	1.082.685.095,00	3.213.697.550,00	428,49	

hal. 2

NO	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	20.488.863.200,00	18.581.828.850,00	2.134.539.921,00	20.816.368.771,00	101,70	
	4 1 2 01	RETRIBUSI JASA UMUM	17.074.499.300,00	15.813.080.252,00	1.529.899.004,00	17.342.979.256,00	101,87	
1	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.074.409.000,00	2.685.304.102,00	338.620.014,00	3.003.924.116,00	97,71	
		Retribusi Pelayanan Kesehatan di P3M						
		- Rawat Jalan JMC	4.000.000,00	6.365.400,00	294.000,00	6.659.400,00	166,49	DINAS KESEHATAN
		- Rawat Jalan Puskesmas	270.000.000,00	215.226.000,00	20.827.000,00	236.053.000,00	87,43	
		- Rawat Inap Pasien Umum	550.325.000,00	491.143.000,00	56.230.000,00	547.373.000,00	99,46	
		- Rawat Inap Pasien ASKES	306.600.000,00	271.495.000,00	24.825.000,00	296.320.000,00	96,65	
		- Rawat Jalan ASKES	1.537.909.000,00	1.351.145.002,00	123.774.414,00	1.474.919.416,00	95,90	
		- Laboratorium Puskesmas	51.600.000,00	44.348.500,00	6.180.000,00	50.528.500,00	97,92	
		- LABKESDA / JMC	92.000.000,00	73.474.000,00	71.704.500,00	145.178.500,00	157,80	
		- Ambulance	40.500.000,00	41.105.500,00	8.663.500,00	49.769.000,00	122,89	
		- Rawat Jalan Jamsostek	24.200.000,00	25.243.700,00	2.996.600,00	28.240.300,00	116,70	
		- Rawat Jalan Jamkesmas	69.000.000,00	48.500.000,00	7.493.000,00	55.993.000,00	81,15	
		- Rawat Inap Jamkesmas	128.275.000,00	97.258.000,00	15.632.000,00	112.890.000,00	88,01	
			3.074.409.000,00	2.685.304.102,00	338.620.014,00	3.003.924.116,00	97,71	
2	4 1 2 01 02	Ret. Pelayanan Pemampahan/Kebersihan	242.000.000,00	92.720.400,00	25.251.200,00	117.971.600,00	48,75	DPU CIPTA KARYA & TATA RUANG
3	4 1 2 01 03	Ret. Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil						DISPENDUK
	4 1 2 01 03 01	Ret. Penggantian Biaya KTP	880.000.000,00	1.158.861.000,00	1.270.000,00	1.160.131.000,00	131,83	
	4 1 2 01 03 02	Ret. Penggantian Akta Catatan Sipil	210.000.000,00	233.965.000,00	42.167.000,00	276.132.000,00	131,49	
			1.090.000.000,00	1.392.826.000,00	43.437.000,00	1.436.263.000,00	131,77	
4	4 1 2 01 05	Ret. Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum	7.585.210.000,00	6.861.391.000,00	670.361.000,00	7.331.752.000,00	96,85	DISHUB
5	4 1 2 01	Retribusi Pelayanan Pasar						DINAS PASAR
	4 1 2 01 06	- Pasar Umum	4.202.824.050,00	4.038.811.250,00	361.965.790,00	4.400.777.040,00	104,71	
	4 1 2 01 07	- Pasar Hewan	131.843.250,00	154.135.500,00	13.625.000,00	167.760.500,00	127,24	
			4.334.667.300,00	4.192.946.750,00	375.590.790,00	4.568.537.540,00	105,40	
6	4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	744.213.000,00	605.342.000,00	75.939.000,00	681.281.000,00	118,42	DISHUB
7	4 1 2 01 08	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	2.550.000,00	700.000,00	3.250.000,00	108,33	DPU CIPTA KARYA & TATA RUANG

hal. 3

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
f.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4 1 2 02	RETRIBUSI JASA USAHA	2.694.888.900,00	2.049.156.210,00	494.180.781,00	2.543.336.991,00	94,38	
1	4 1 2 02 01	Ret. Pemukiman Kekayaan Daerah						
	4 1 2 02 01 01	- Sewa Tanah dan Bangunan	203.654.100,00	91.768.110,00	0,00	91.768.110,00	45,06	DIPENDA
	4 1 2 02 01 02	- Sewa Alat-Alat Berat	39.000.000,00	39.230.000,00	3.680.000,00	42.910.000,00	110,03	DPU BINA MARGA
	4 1 2 02 01 02	- Sewa Work Shop (AMF)	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPU BINA MARGA
	4 1 2 02 01 04	- Sewa Rumah Dinas	35.000.000,00	31.035.000,00	5.322.500,00	36.357.500,00	103,88	DIPENDA
	4 1 2 02 01 05	- Sewa Tempat Olah Raga	86.000.000,00	102.150.000,00	41.200.000,00	143.350.000,00	166,69	DIPENDA
			493.654.100,00	254.183.110,00	50.202.500,00	314.385.610,00	63,69	
2	4 1 2 02 04	Retribusi Terminal						
	4 1 2 02 04 01	- Retribusi Jasa Usaha Terminal	649.724.800,00	547.973.600,00	75.445.450,00	623.419.050,00	95,95	DISHUB
			649.724.800,00	547.973.600,00	75.445.450,00	623.419.050,00	95,95	
3	4 1 2 02 06	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa						DIPENDA
	4 1 2 02 06 01	- Rantabangun	479.510.000,00	324.808.000,00	155.358.831,00	480.166.831,00	100,14	
	4 1 2 02 06 02	- Kebonagung	310.000.000,00	225.300.000,00	87.000.000,00	312.300.000,00	100,74	
			789.510.000,00	550.108.000,00	242.358.831,00	792.466.831,00	100,37	
4	4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)						DISPERKEL
	4 1 2 02 08 01	- Ret. RPH Sapi	118.864.000,00	118.860.000,00	3.730.000,00	122.590.000,00	103,13	
	4 1 2 02 08 02	- Ret. RPH Babi	12.160.000,00	10.080.000,00	600.000,00	10.680.000,00	87,83	
	4 1 2 02 08 03	- Ret. RPH Kambing	7.140.000,00	3.985.000,00	155.000,00	4.140.000,00	57,98	
	4 1 2 02 08 04	- Hektering Sapi	1.736.000,00	2.278.000,00	80.000,00	2.358.000,00	135,83	
	4 1 2 02 08 05	- Hektering Babi	100.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	520,00	
			140.000.000,00	136.723.000,00	4.585.000,00	140.288.000,00	100,21	
5	4 1 2 02 10	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga						DIPENDA
	4 1 2 02 10 01	- Wata ubi	200.000.000,00	155.225.500,00	44.290.000,00	199.515.500,00	99,76	
	4 1 2 02 10 02	- Patemon	400.000.000,00	371.943.000,00	77.319.000,00	449.262.000,00	112,32	
	4 1 2 02 10 03	- Pasaran	11.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	109,09	
	4 1 2 02 10 04	- Puger	11.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	109,09	
			622.000.000,00	551.168.500,00	121.609.000,00	672.777.500,00	108,18	

hal. 4

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
f.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
4	1 2 03	RETRIBUSI PERIZINAN TERKENTU	699.275.000,00	819.592.388,00	110.460.136,00	930.062.524,00	133,00	
1	4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	520.000.000,00	685.837.068,00	80.599.176,00	766.436.244,00	147,39	DPU CIPTA KARYA & TATA RUANG
2	4 1 2 03 02	Retribusi Izin Gangguan	100.000.000,00	58.908.000,00	27.850.000,00	86.758.000,00	86,75	KTR. LINGKARHUP
3	4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trotoar	27.625.000,00	23.197.320,00	2.010.960,00	25.208.280,00	91,25	DISHUB
4	4 1 2 03 12	Ret. Izn Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	45.250.000,00	45.250.000,00	0,00	45.250.000,00	100,00	DISPERINDAG
5	4 1 2 03 13	Retribusi Izn Usaha Industri (IUI)	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	100,00	DISPERINDAG
4	1 3	NABIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	16.290.668.018,32	13.973.287.377,32	1.317.278.641,50	15.290.566.018,82	100,00	
1	4 1 3 01	Bagian Laba atau Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	8.817.278.641,00	7.500.000.000,00	1.317.278.641,50	8.817.278.641,50	100,00	
4	1 3 01 05	- Perusahaan Daerah Perkebunan	8.817.278.641,00	7.500.000.000,00	1.317.278.641,50	8.817.278.641,50	100,00	PDP
2	4 1 3 02	Bagian Laba atau Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah						
4	1 3 02 01	- PT. Bank Jatim (Dividen)	6.473.287.377,32	6.473.287.377,32	0,00	6.473.287.377,32	100,00	PPKD
4	1 4	LAIN-LAIN PEND. ASLI DAERAH YG SAH	100.902.620.483,00	88.967.763.615,82	16.710.718.358,65	105.678.481.974,47	104,73	
1	4 1 4 01	Hasil Perjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	489.800.000,00	326.347.500,00	114.451.000,00	440.798.500,00	88,19	
4	1 4 01 07	Penj. Drum Bekas dan Direksi Keel Proyek	30.000.000,00	22.732.500,00	0,00	22.732.500,00	75,75	DPU BINA MARGA
4	1 4 01 13	Perjualan Hasil Pertanian	223.000.000,00	194.865.000,00	28.135.000,00	223.000.000,00	100,00	DNAS PERTANIAN
4	1 4 01 16	Perjualan Hasil Peternakan	136.800.000,00	27.000.000,00	57.966.000,00	84.966.000,00	62,11	DISPERKEL
4	1 4 01 17	Perjualan Hasil Perikanan (Suddaya Ikat)	110.000.000,00	81.750.000,00	28.350.000,00	110.100.000,00	100,09	DISPERKEL
2	4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro						
4	1 4 02 01	- Jasa Giro Kas Daerah	2.200.000.000,00	7.058.523.990,89	557.687.311,80	7.616.211.302,69	346,19	PPKD
3	4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito						
4	1 4 03 01	- Bunga Deposito pada Bank Jatim	7.700.000.000,00	6.049.315.068,42	986.301.369,85	7.035.616.438,27	91,37	PPKD
4	1 4 14	Penerimaan Lain-Lain						
4	1 4 14	- Penerimaan Lain-Lain	0,00	1.932.683.542,61	0,00	1.932.683.542,61	0,00	PPKD
5	4 1 4 15	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD)						
4	1 4 15	- Pendapatan BLUD	90.802.820.483,00	73.600.893.513,90	15.052.278.677,00	88.653.172.190,90	97,96	PPKD
		- Retribusi Pelayanan RSD Balung	14.656.568.923,00	11.106.598.717,00	1.129.959.112,00	12.236.557.829,00	83,49	
		- Retribusi Pelayanan RSD Kalbar	5.846.231.560,00	4.725.919.072,00	878.890.732,00	5.604.809.804,00	95,87	
		- Retribusi Pelayanan RSD Dr. Suband	70.000.000.000,00	57.768.375.724,90	13.043.428.833,00	70.811.804.557,90	101,16	

hal. 5

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT	
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
4	2		DAWA PERIMBANGAN	1.237.545.929.831,00	1.147.106.081.789,00	103.728.869.735,00	1.250.834.951.524,00	101,07	
4	2	1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	78.119.757.831,00	88.878.449.789,00	34.010.829.735,00	92.589.279.524,00	118,52	
	4	2	1	01	01	01	01	01	01
			Bagi Hasil Pajak	69.797.157.868,00	61.408.763.792,00	31.364.013.380,00	82.772.767.152,00	118,59	
1	4	2	1	01	01	01	01	01	01
			- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	44.990.207.087,00	34.773.996.364,00	21.686.964.421,00	56.480.960.785,00	125,50	PPKD
2	4	2	1	01	03				
			- Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOP Dalam Negeri dan PPH Pasal 21.	13.179.447.800,00	7.959.052.878,00	5.486.257.146,00	13.445.310.024,00	102,02	PPKD
3	4	2	1	01	04				
			- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	11.627.502.879,00	8.675.704.550,00	4.190.791.793,00	12.866.496.343,00	110,66	PPKD
4	2	1	02						
			Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8.322.600.265,00	7.169.696.997,00	2.646.816.375,00	9.816.512.372,00	117,98	
1	4	2	1	02	02				
			- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.550.489.531,00	1.119.038.355,00	281.708.125,00	1.400.146.480,00	90,30	PPKD
2	4	2	1	02	04				
			- Iuran Tetap / Land Rent	25.986.100,00	0,00	791.072,00	791.072,00	3,04	PPKD
3	4	2	1	02	05				
			- Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	61.812.050,00	23.488.938,00	10.278.314,00	33.787.252,00	54,63	PPKD
4	4	2	1	02	06				
			- Pungutan Pengusahaan Perikanan	249.099.085,00	171.312.380,00	89.735.862,00	261.048.242,00	104,80	PPKD
5	4	2	1	02	08				
			- Pertambangan Minyak Bumi	5.942.522.499,00	5.585.050.049,00	2.264.903.002,00	7.849.953.051,00	132,10	PPKD
6	4	2	1	02	09				
			- Pertambangan Gas Bumi	492.711.000,00	270.806.275,00	0,00	270.806.275,00	54,96	PPKD
4	2	2							
			Dana Alokasi Umum (DAU)	1.059.816.172.000,00	1.058.648.472.000,00	0,00	1.058.648.472.000,00	99,89	PPKD
1	4	2	2	02					
			Dana Alokasi Umum	1.059.816.172.000,00	1.058.648.472.000,00	0,00	1.058.648.472.000,00	99,89	
4	2	3							
			Dana Alokasi Khusus (DAK)	99.610.000.000,00	29.879.160.000,00	69.718.040.000,00	99.597.200.000,00	99,99	PPKD
1	4	2	3	01	01				
			- DAK Bidang Pendidikan	61.908.900.000,00	18.570.283.390,46	43.330.661.244,41	61.900.944.634,87	99,99	
2	4	2	3	01	02				
			- DAK Bidang Pelayanan Rujukan	6.695.000.000,00	2.008.241.905,43	4.685.897.779,34	6.694.139.684,77	99,99	
3	4	2	3	01	03				
			- DAK Bidang Jalan	8.281.200.000,00	2.484.040.766,87	5.796.095.099,37	8.280.135.856,24	99,99	
4	4	2	3	01	04				
			- DAK Bidang Irtir	3.882.200.000,00	1.164.510.339,85	2.717.190.792,97	3.681.701.132,62	99,99	
5	4	2	3	01	05				
			- DAK Bidang Air Minum	1.370.500.000,00	411.097.166,75	959.226.722,42	1.370.323.889,17	99,99	
6	4	2	3	01	06				
			- DAK Bidang Sanitasi	1.157.900.000,00	347.325.362,55	810.425.845,96	1.157.751.208,51	99,99	
7	4	2	3	01	07				
			- DAK Bidang Pertanian	6.032.300.000,00	1.809.457.452,75	4.222.067.389,74	6.031.524.842,49	99,99	
8	4	2	3	01	08				
			- DAK Bidang Keluarga Berencana	1.322.500.000,00	396.899.017,17	925.631.040,06	1.322.330.057,23	99,99	
9	4	2	3	01	09				
			- DAK Bidang Pelayanan Farmasi	8.859.500.000,00	2.687.504.608,17	6.270.844.085,73	8.858.348.693,90	99,99	

hal. 8

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
f.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YD SAH	444.200.784.240,00	373.082.109.304,00	75.872.331.820,00	448.954.440.824,00	101,07	
	4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pendapatan Daerah Lainnya	81.106.838.920,00	57.072.744.364,00	31.668.913.837,00	88.738.658.201,00	109,41	
	4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	81.106.838.920,00	57.072.744.364,00	31.668.913.837,00	88.738.658.201,00	109,41	
1	4 3 3 01 01	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	22.169.257.719,00	15.438.250.387,00	8.155.943.915,00	23.592.194.302,00	106,42	PPND
2	4 3 3 01 03	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	25.876.247.142,00	18.355.624.206,00	13.649.785.105,00	32.005.409.311,00	123,89	PPND
3	4 3 3 01 05	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	33.061.035.069,00	23.280.869.771,00	9.860.184.817,00	33.141.054.588,00	100,24	PPND
	4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	334.447.293.520,00	277.468.704.500,00	44.077.837.020,00	321.844.841.820,00	99,11	PPND
	4 3 4 01	Dana Penyesuaian						
1	4 3 4 01 01	Pendapatan OP Tamb. Penghasilan Bumi PNS	18.887.250.000,00	14.165.439.000,00	4.721.811.000,00	18.887.250.000,00	100,00	
2	4 3 4 01 02	Pendapatan Tunjangan Profesi Guru PNSD	145.002.542.520,00	108.751.908.000,00	36.250.634.520,00	145.002.542.520,00	100,00	
3	4 3 4 01 03	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	129.235.714.000,00	129.235.714.000,00	0,00	129.235.714.000,00	100,00	
4	4 3 4 01 04	Dana Percepatan Pemh. Infias. Daerah (DPPID)	12.016.287.000,00	6.008.143.500,00	3.105.391.500,00	9.113.835.000,00	75,84	
5	4 3 4 01 05	Dana Insentif Daerah	19.305.500.000,00	19.305.500.000,00	0,00	19.305.500.000,00	100,00	
	4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Provda Lainnya	38.409.054.500,00	38.409.054.500,00	100.000.000,00	38.509.054.500,00	100,26	PPND
	4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi						
1	4 3 5 01 01	Pendapatan Bantuan Keuangan dr. Prop. Jatim	38.409.054.500,00	38.409.054.500,00	100.000.000,00	38.509.054.500,00	100,26	
	4 3 6	Dana Bagi Hasil Retribusi	237.896.300,00	133.605.940,00	28.580.763,00	162.188.703,00	68,18	PPND
	4 3 6 01	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi						
		Berdasarkan						
1	4 3 6 01 01	Dana Bagi Hasil Retribusi IMTA	49.257.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	4 3 6 01 02	Dana Bagi Hasil dari Bea Tera	26.452.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	4 3 6 01 03	Dana Bagi Hasil Retribusi Pengujian Kayu Jati	162.186.700,00	133.605.940,00	28.580.763,00	162.186.703,00	100,00	



## LAMPIRAN 6

**DAFTAR REALISASI PBB SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN TAHUN 2012**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**S/D TANGGAL 31 DESEMBER 2013**

NO.	KECAMATAN	B A K U	REALISASI	%	S I S A	KETERANGAN
1	Ambulu	945.417.615	946.340.367	100,10	(922.752)	Lunas, 17-09-2012
2	Semboro	435.553.059	406.686.670	93,37	28.866.389	
3	Kencong	696.758.563	592.288.456	85,01	104.470.107	
4	Umbulsari	1.137.192.359	959.305.345	84,36	177.887.014	
5	Gumukmas	786.566.539	645.443.473	82,06	141.123.066	
6	Balung	850.871.275	697.556.167	81,98	153.315.108	
7	Bangsalsari	751.426.222	605.203.993	80,54	146.222.229	
8	Tanggul	534.064.151	417.388.624	78,15	116.675.527	
9	Jombang	600.313.861	458.928.254	76,45	141.385.607	
10	Silo	402.082.625	303.188.053	75,40	98.894.572	
11	Rambipuji	751.199.231	553.300.754	73,66	197.898.477	
12	Tempurejo	308.884.217	220.332.117	71,33	88.552.100	
13	Kaliwates	4.520.551.630	3.145.536.676	69,58	1.375.014.954	
14	Sumberjambe	436.012.200	299.960.442	68,80	136.051.758	
15	Ledokombo	389.507.376	265.733.348	68,22	123.774.028	
16	Sumberbaru	570.965.178	376.349.746	65,91	194.615.432	
17	Sukorambi	371.756.387	240.786.844	64,77	130.969.543	
18	Sukowono	368.361.605	229.103.412	62,20	139.258.193	
19	Panti	442.924.996	275.254.636	62,14	167.670.360	
20	Wuluhan	995.509.247	582.972.783	58,56	412.536.464	
21	Pakusari	444.639.205	245.725.348	55,26	198.913.857	
22	Puger	1.152.231.365	630.648.862	54,73	521.582.503	
23	Jenggawah	987.419.289	531.960.879	53,87	455.458.410	
24	Sumbersari	2.842.706.384	1.462.902.429	51,46	1.379.803.955	
25	Ajung	775.577.217	393.883.580	50,79	381.693.637	
26	Patrang	1.593.931.869	795.725.023	49,92	798.206.846	
27	Kalisat	540.745.124	268.232.918	49,60	272.512.206	
28	Mayang	422.606.437	199.013.486	47,09	223.592.951	
29	Jelbuk	296.252.007	125.947.816	42,51	170.304.191	
30	Arjasa	291.142.413	93.617.762	32,16	197.524.651	
31	Mumbulsari	378.779.830	96.790.539	25,55	281.989.291	
	<b>JUMLAH</b>	<b>26.021.949.476</b>	<b>17.066.108.802</b>	<b>65,58</b>	<b>8.955.840.674</b>	

Jember, 6 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER

**Drs. SUPRAPTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610721 198603 1 011

LAMPIRAN 7

**DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**  
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

**DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PAK) KABUPATEN JEMBER APBD TAHUN ANGGARAN 2012 S/D TANGGAL 31 Desember 2012**

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4		PENDAPATAN DAERAH	2.110.026.697.225,31	2.946.386.376.948,34	99.703.841.912,38	2.146.090.218.860,72	101,71	
4 1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	237.881.681.826,31	231.768.395.606,34	24.036.379.577,38	255.804.775.083,72	107,53	
4 1 1		HASIL PAJAK DAERAH	80.694.817.000,00	49.945.785.999,00	5.201.348.712,00	55.147.114.711,00	108,78	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel						DIPENDA
	4 1 1 01 15	- Hotel	1.300.000.000,00	1.381.905.380,00	150.519.293,00	1.532.424.673,00	117,88	
			1.300.000.000,00	1.381.905.380,00	150.519.293,00	1.532.424.673,00	117,88	
2	4 1 1 02	Pajak Restoran						DIPENDA
	4 1 1 02 01	- Restoran	3.500.000.000,00	4.244.898.524,00	510.578.119,00	4.755.476.643,00	135,87	
			3.500.000.000,00	4.244.898.524,00	510.578.119,00	4.755.476.643,00	135,87	
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan						DIPENDA
	4 1 1 03 20	- Pajak Hiburan	350.000.000,00	455.378.914,00	35.988.232,00	491.363.146,00	140,39	
			350.000.000,00	455.378.914,00	35.988.232,00	491.363.146,00	140,39	
4	4 1 1 04	Pajak Reklame						DIPENDA
	4 1 1 04 11	- Pajak Reklame	3.500.000.000,00	4.318.302.799,00	444.805.619,00	4.763.108.418,00	136,09	
			3.500.000.000,00	4.318.302.799,00	444.805.619,00	4.763.108.418,00	136,09	
5	4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan (PJL)						PT. PLJ
	4 1 1 05 01	- Pajak Penerangan Jalan PT. PLJ	30.500.000.000,00	28.504.070.242,00	2.964.948.873,00	31.469.019.115,00	103,16	
			30.500.000.000,00	28.504.070.242,00	2.964.948.873,00	31.469.019.115,00	103,16	
6	4 1 1 07	Pajak Parkir						DIPENDA
	4 1 1 07 01	- Pajak Parkir	29.417.000,00	83.149.500,00	12.026.850,00	95.176.350,00	323,54	
			29.417.000,00	83.149.500,00	12.026.850,00	95.176.350,00	323,54	
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah						DIPENDA
	4 1 1 08 01	- Pajak Air Tanah	350.000.000,00	249.039.197,00	22.625.673,00	271.664.870,00	77,62	
			350.000.000,00	249.039.197,00	22.625.673,00	271.664.870,00	77,62	
8	4 1 1 09	Pajak Samsung Burung Walet						DIPENDA
	4 1 1 09 01	- Pajak Samsung Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						DIPENDA
	4 1 1 11 07	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	205.000.000,00	343.098.528,00	45.283.578,00	388.382.106,00	189,45	
			205.000.000,00	343.098.528,00	45.283.578,00	388.382.106,00	189,45	
10	4 1 1 13	Bea Perakitan Hak Atas Tanah dan Bangunan						DIPENDA
	4 1 1 13 01	- Bea Perakitan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.960.400.000,00	10.365.924.915,00	1.014.574.475,00	11.380.499.390,00	103,83	
			10.960.400.000,00	10.365.924.915,00	1.014.574.475,00	11.380.499.390,00	103,83	

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	40.699.994.000,00	35.151.552.075,00	5.265.560.782,00	40.417.112.857,00	99,30	
	4 1 2 01	RETRIBUSI JASA UMUM	35.789.804.000,00	30.680.188.023,00	4.128.789.134,00	34.808.977.157,00	97,28	
1	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.212.902.000,00	17.804.670.593,00	3.097.129.004,00	20.901.799.597,00	94,10	
	4 1 2 01 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM	22.212.902.000,00	17.804.670.593,00	3.097.129.004,00	20.901.799.597,00	94,10	
		a. UMUM	2.846.758.000,00	2.668.765.500,00	341.103.500,00	2.909.869.000,00	102,22	DINAS KESEHATAN
		- Rawat Jalan	420.114.000,00	404.507.000,00	37.571.500,00	442.078.500,00	105,23	
		- Rawat Inap	2.153.280.000,00	2.013.369.500,00	183.215.000,00	2.196.584.500,00	102,01	
		- Laboratorium	108.764.000,00	90.899.000,00	9.102.000,00	100.001.000,00	91,94	
		- Ambulance	164.600.000,00	159.990.000,00	11.215.000,00	171.205.000,00	104,01	
		b. JEMBER MEDICAL CENTER	100.168.000,00	89.432.500,00	8.532.250,00	97.964.750,00	97,80	
		c. LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN	18.000.000,00	14.325.000,00	1.650.000,00	15.975.000,00	106,50	
		d. ASKES	1.991.054.000,00	1.807.617.593,00	169.281.254,00	1.976.898.847,00	99,29	
		- Rawat Jalan	1.456.808.000,00	1.340.122.593,00	125.805.154,00	1.465.927.747,00	100,63	
		- Rawat Inap	497.020.000,00	429.895.000,00	39.585.000,00	469.480.000,00	94,46	
		- Jamsostek	37.226.000,00	37.600.000,00	3.891.100,00	41.491.100,00	111,46	
		e. JAMKESMAS	2.144.251.000,00	1.102.695.000,00	167.072.000,00	1.269.767.000,00	59,22	
		- Rawat Jalan	871.426.000,00	503.285.000,00	65.310.000,00	568.595.000,00	65,25	
		- Rawat Inap	1.012.900.000,00	481.495.000,00	85.890.000,00	567.385.000,00	56,02	
		- Ambulance	259.925.000,00	117.915.000,00	15.872.000,00	133.787.000,00	51,47	
		f. JAMPERSAL	15.115.674.000,00	12.121.835.000,00	2.509.490.000,00	14.631.325.000,00	96,80	
			22.212.902.000,00	17.804.670.593,00	3.097.129.004,00	20.901.799.597,00	94,10	
2	4 1 2 01 02	Ret. Pelayanan Perumahan/Kebersihan	242.000.000,00	107.449.400,00	40.929.400,00	148.378.800,00	61,31	DPU CIPTA KARYA & TATA RUANG
3	4 1 2 01 03	Ret. Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil	68.000.000,00	107.513.000,00	6.159.000,00	113.672.000,00	167,16	DSPENDUK
		- Ret. Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil	68.000.000,00	107.513.000,00	6.159.000,00	113.672.000,00	167,16	
4	4 1 2 01 04	Ret. Pelayanan Pemukiman dan Peningkatan Masy	600.000,00	550.000,00	1.110.000,00	1.560.000,00	275,57	DPU CIPTA KARYA & TATA RUANG
5	4 1 2 01 05	Ret. Pelayanan Parkir Dilap. Jalan Umum	7.662.290.000,00	7.198.234.000,00	710.588.000,00	7.908.822.000,00	103,22	DISHUB
6	4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	4.417.052.000,00	4.106.574.830,00	56.354.730,00	4.162.929.560,00	94,25	DINAS PASAR
		- Pasar Umum	4.417.052.000,00	4.106.574.830,00	56.354.730,00	4.162.929.560,00	94,25	
		- Pasar Hewan	83.900.000,00	111.290.000,00	6.484.000,00	117.774.000,00	140,37	
			4.500.952.000,00	4.217.864.830,00	62.838.730,00	4.280.702.560,00	95,11	
7	4 1 2 01 07	Retribusi Pengepungan Rambu-rambu Bermotor	1.051.310.000,00	1.198.326.800,00	116.146.800,00	1.314.473.200,00	125,03	DISHUB
8	4 1 2 01 08	Ret. Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	116,67	DPU CIPTA KARYA & TATA RUANG
9	4 1 2 01 11	Ret. Penyedotan dan Penyediaan Kulkas	750.000,00	750.000,00	67.128.000,00	67.878.000,00	9.050,40	DPU CIPTA KARYA & TATA RUANG
10	4 1 2 01 12	Ret. Pengelolaan Limbah Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KTR LINGKUNGAN HIDUP
11	4 1 2 01 13	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	48.000.000,00	41.329.600,00	26.761.000,00	68.090.600,00	141,86	DISHUB

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4 1 2 02	RETRIBUSI JASA USAHA	4.354.500.000,00	3.599.408.965,00	871.722.450,00	4.471.131.415,00	102,68	
1	4 1 2 02 01	Ret. Pemakaian Kelaysan Daerah						
	4 1 2 02 01	- Sewa Tanah dan Bangunan	276.000.000,00	217.695.865,00	40.000.000,00	257.695.865,00	93,37	
		1. Dinas Pendapatan	100.000.000,00	41.600.800,00	40.000.000,00	81.600.800,00	81,60	DIPENDA
		2. Dinas Pengairan	176.000.000,00	176.095.065,00	0,00	176.095.065,00	100,05	DINAS PENGAIRAN
	4 1 2 02 01	- Sewa Rumaja	200.000.000,00	68.160.000,00	9.803.250,00	77.963.250,00	38,98	DPU BINA MARGA
	4 1 2 02 01	- Sewa Alat-Alat Berat	46.000.000,00	46.035.000,00	4.050.000,00	50.085.000,00	108,88	DPU BINA MARGA
	4 1 2 02 01	- Sewa Work Shop (AMP)	140.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	35,71	DPU BINA MARGA
	4 1 2 02 01	- Sewa Rumah Dinas	53.500.000,00	34.632.500,00	10.890.000,00	45.522.500,00	85,09	DIPENDA
	4 1 2 02 01	- Sewa Tempat Olah Raga	100.000.000,00	74.455.000,00	45.970.000,00	120.425.000,00	120,43	DIPENDA
			815.500.000,00	490.978.365,00	110.713.250,00	601.691.615,00	73,78	
2	4 1 2 02 02	- Retribusi Pasar Grosir / Perlokasan	140.000.000,00	115.560.000,00	8.580.000,00	124.140.000,00	88,67	DINAS PASAR
3	4 1 2 02 04	- Retribusi Terminal	725.000.000,00	778.673.100,00	87.873.500,00	866.546.600,00	119,52	DISHUB
4	4 1 2 02 05	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	54.000.000,00	7.150.000,00	323.407.500,00	330.557.500,00	612,13	DISHUB
5	4 1 2 02 06	Ret. Tempat Penghapusan/Pesanggrahan/Vila						DIPENDA
	4 1 2 02 06	- Rambangan	500.000.000,00	496.656.500,00	60.747.500,00	557.404.000,00	111,48	
	4 1 2 02 06	- Kebonagung	400.000.000,00	247.488.000,00	66.576.200,00	314.064.200,00	78,52	
			900.000.000,00	744.144.500,00	127.323.700,00	871.468.200,00	96,83	
6	4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)						DIGPERKEL
	4 1 2 02 08	- Ret. RPH Sapi	118.864.000,00	118.162.000,00	5.344.000,00	123.506.000,00	103,91	
	4 1 2 02 08	- Ret. RPH Babi	12.160.000,00	6.570.000,00	2.480.000,00	9.050.000,00	74,42	
	4 1 2 02 08	- Ret. RPH Kambing	7.140.000,00	3.105.000,00	325.000,00	3.430.000,00	48,04	
	4 1 2 02 08	- Herkaring Sapi	1.736.000,00	3.960.000,00	175.000,00	4.135.000,00	238,19	
	4 1 2 02 08	- Herkaring Babi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140.000.000,00	131.797.000,00	8.324.000,00	140.121.000,00	100,09	
7	4 1 2 02 10	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga						DIPENDA
	4 1 2 02 10	- Waku sio	250.000.000,00	190.955.000,00	59.415.000,00	250.370.000,00	100,15	
	4 1 2 02 10	- Patemon	500.000.000,00	444.025.000,00	64.194.000,00	508.219.000,00	101,64	
	4 1 2 02 10	- Paseban	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	80,00	
	4 1 2 02 10	- Puger	15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	80,00	
	4 1 2 02 10	- Rambangan (Kolam Permandian)	500.000.000,00	370.139.000,00	58.562.500,00	428.721.500,00	85,74	
	4 1 2 02 10	- Kolam Agung (Kolam Permandian)	300.000.000,00	301.987.000,00	23.315.000,00	325.302.000,00	108,43	
			1.580.000.000,00	1.331.106.000,00	205.506.500,00	1.536.612.500,00	97,25	
	4 1 2 03	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	555.690.000,00	871.955.087,00	265.049.198,00	1.137.004.285,00	204,61	
1	4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	420.000.000,00	802.420.087,00	198.868.808,00	1.001.308.895,00	238,41	DPU OPTIA KARYA & TATA RUANG
2	4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan	100.000.000,00	34.281.100,00	65.309.790,00	99.590.890,00	99,59	KTR LINGK.HIDUP
3	4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek	35.690.000,00	35.253.900,00	850.600,00	36.104.500,00	101,16	DISHUB

hal 4

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISANKAN	15.225.383.198,31	13.051.954.741,31	2.173.428.457,88	15.225.383.199,17	100,00	
4	1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal						
		Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	15.225.383.198,31	13.051.954.741,31	2.173.428.457,88	15.225.383.199,17	100,00	
1	4 1 3 01 03	- Pendapatan Dividen Bank Jatin	5.551.954.741,31	5.551.954.741,31	0,00	5.551.954.741,31	100,00	PPKD
2	4 1 3 01 05	- Perusahaan Daerah Perkebunan (POP)	9.673.428.457,00	7.500.000.000,00	2.173.428.457,88	9.673.428.457,86	100,00	POP
4	1 4	LAIN-LAIN PEND. ASLI DAERAH YANG DIPISANKAN	131.261.487.828,00	133.619.122.691,03	11.396.041.825,52	145.015.184.316,55	110,48	
1	4 1 4 01	Hasil Perjualan Asat Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.080.035.000,00	363.565.000,00	161.000.000,00	524.565.000,00	48,57	
		Perjualan Kendaraan Dinas Roda 2	8.000.000,00	36.480.000,00	0,00	36.480.000,00	456,00	BAG. PERLENGKAPAN
		Perjualan Kendaraan Dinas Roda 4	300.000.000,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	35,00	BAG. PERLENGKAPAN
		Perjualan Drum Bekas	21.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPN BINA MARGA
		Perjualan Hasil Perikanan	592.885.000,00	109.885.000,00	115.000.000,00	224.885.000,00	37,93	DMAS PERTANIAN
		Perjualan Hasil Perikanan	48.000.000,00	38.000.000,00	10.000.000,00	48.000.000,00	100,00	DISPERKEL
		Perjualan Hasil Perikanan	110.000.000,00	74.200.000,00	35.000.000,00	110.200.000,00	100,18	DISPERKEL
2	4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	3.100.000.000,00	5.071.482.195,00	341.007.041,11	5.412.489.236,11		
		- Jasa Giro Kas Daerah	3.100.000.000,00	4.978.638.685,49	329.356.711,82	5.307.995.397,31	171,23	PPKD
		- Jasa Giro Pemegang Kas	0,00	92.843.509,51	11.650.329,29	104.493.838,80	0,00	PPKD
3	4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito						
		- Bunga Deposito pada Bank Jatin	9.500.000.000,00	15.770.205.479,30	1.883.561.643,81	17.653.767.123,11	185,83	PPKD
4	1 4	Penerimaan Lain-Lain						
		- Penerimaan Lain-Lain	0,00	2.226.052.110,73	(53.569.300,40)	2.172.482.810,33	0,00	PPKD
5	4 1 4 15	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	117.581.452.628,00	110.187.817.906,00	8.064.042.241,00	119.251.860.147,00	101,42	PPKD
		- Retribusi Pelayanan RSD Batang	15.809.452.828,00	13.106.715.117,00	1.126.378.815,00	14.233.094.032,00	90,03	
		- Retribusi Pelayanan RSD Kalas	6.772.000.000,00	5.757.498.772,00	1.016.672.164,00	6.773.170.936,00	100,02	
		- Retribusi Pelayanan RSD Dr. Subandi	85.000.000.000,00	81.323.804.017,00	6.921.991.162,00	88.245.795.179,00	103,42	
4	2	DANA PERMISYAN	1.461.556.235.815,00	1.434.018.585.874,00	50.091.714.834,00	1.484.110.400.708,00	101,54	
4	2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	86.895.731.816,00	83.199.366.874,00	26.250.529.834,00	109.449.896.708,00	125,96	
		Bagi Hasil Pajak	78.840.869.408,00	89.991.758.452,00	19.491.746.275,00	89.483.504.727,00	116,78	
		- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	46.990.207.087,00	40.853.872.434,00	7.142.284.841,00	47.996.157.275,00	102,14	PPKD
		- B P H T B	0,00	0,00	481.489.231,00	481.489.231,00	0,00	
		- Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 25 WPOP Dalam Negeri dan PPh Pd 21	13.179.447.600,00	17.130.828.826,00	6.471.029.253,00	23.601.858.079,00	179,08	PPKD
		- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	16.471.214.721,00	12.007.057.192,00	5.398.962.950,00	17.404.020.142,00	105,66	PPKD
4	2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	10.254.862.408,00	13.207.608.422,00	6.758.783.559,00	19.966.391.981,00	194,70	
		- Penerimaan Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.033.380.173,00	1.148.348.921,00	697.936.243,00	1.846.285.164,00	178,66	PPKD
		- Iuran Tetap / Land Rent	25.986.100,00	967.485,00	0,00	967.485,00	3,72	PPKD
		- Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	61.812.050,00	12.567.600,00	0,00	12.567.600,00	20,33	PPKD
		- Pungutan Pengusahaan Perikanan	249.099.085,00	262.636.392,00	81.349.827,00	343.986.219,00	138,09	PPKD
		- Pertambangan Minyak Bumi	8.556.274.000,00	10.956.651.507,00	3.819.400.711,00	14.776.052.218,00	172,69	PPKD
		- Pertambangan Gas Bumi	328.311.000,00	826.436.517,00	2.180.098.778,00	2.986.533.295,00	909,67	PPKD

hal. 5

NO.	KODE REKONING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4 2 2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.279.295.764.000,00	1.279.295.764.000,00	0,00	1.279.295.764.000,00	100,00	PPKD
1	4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	1.279.295.764.000,00	1.279.295.764.000,00	0,00	1.279.295.764.000,00	100,00	
	4 2 3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	95.364.740.000,00	71.523.555.000,00	23.841.185.000,00	95.364.740.000,00	100,00	PPKD
1	4 2 3 01 01	- DAK Bidang Pendidikan	54.771.600.000,00	24.908.557.753,46	29.863.042.246,54	54.771.600.000,00	100,00	
2	4 2 3 01 02	- DAK Bidang Pelayanan Dasar	5.122.730.000,00	2.329.671.144,55	2.793.058.855,45	5.122.730.000,00	100,00	
3	4 2 3 01 04	- DAK Bidang Jalan	7.581.250.000,00	3.447.735.751,16	4.133.514.248,84	7.581.250.000,00	100,00	
4	4 2 3 01 05	- DAK Bidang Energi	2.967.680.000,00	1.358.711.445,87	1.628.968.554,13	2.967.680.000,00	100,00	
5	4 2 3 01 06	- DAK Bidang Air Minum	1.793.030.000,00	815.418.781,06	977.611.218,94	1.793.030.000,00	100,00	
6	4 2 3 01 07	- DAK Bidang Sanitasi	1.255.700.000,00	571.056.459,38	684.643.540,62	1.255.700.000,00	100,00	
7	4 2 3 01 08	- DAK Bidang Pertanian	6.088.260.000,00	2.768.766.583,93	3.319.493.416,07	6.088.260.000,00	100,00	
8	4 2 3 01 09	- DAK Bidang Keluarga Berencana	1.121.630.000,00	510.085.256,47	611.544.743,53	1.121.630.000,00	100,00	
9	4 2 3 01 11	- DAK Bidang Pelayanan Bidang Farmasi	9.186.440.000,00	4.177.730.270,60	5.008.709.729,40	9.186.440.000,00	100,00	
10	4 2 3 01 12	- DAK Bidang Perdagangan	5.146.880.000,00	2.340.653.874,09	2.806.226.125,91	5.146.880.000,00	100,00	
11	4 2 3 01 13	- DAK Bidang Kesiapan Transportasi Darat	309.540.000,00	140.769.942,22	168.770.057,78	309.540.000,00	100,00	
12	4 2 3 01 14	- DAK Bidang Pendidikan 2011	0,00	28.154.397.737,21	(28.154.397.737,21)	0,00	0,00	
	4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	410.588.779.583,00	380.599.295.568,00	25.575.747.501,00	406.175.043.069,00	98,93	
	4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	92.905.003.891,00	64.040.514.060,00	25.456.409.125,00	89.496.923.185,00	96,33	
	4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	92.905.003.891,00	64.040.514.060,00	25.456.409.125,00	89.496.923.185,00	96,33	
1	4 3 3 01 01	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	25.817.618.445,00	17.606.756.976,00	8.638.556.410,00	26.245.313.386,00	101,66	PPKD
2	4 3 3 01 03	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	33.912.169.067,00	23.494.133.908,00	5.366.761.137,00	29.860.895.045,00	88,05	PPKD
3	4 3 3 01 05	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	32.947.390.500,00	22.773.443.372,00	10.380.469.559,00	33.153.912.931,00	100,63	PPKD
4	4 3 3 01 04	- Pajak Air Permukaan	227.825.859,00	166.179.804,00	70.622.019,00	236.801.823,00	103,94	PPKD
	4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	268.546.817.000,00	267.666.607.000,00	0,00	267.666.607.000,00	99,67	PPKD
	4 3 4 01	Dana Penyesuaian						
1	4 3 4 01 02	Pendapatan DP Tamb. Penghasilan Guru PNS	11.817.000.000,00	11.817.000.000,00	0,00	11.817.000.000,00	100,00	
2	4 3 4 01 03	Pendapatan Tunjangan Profesi Guru PNSD	255.849.607.000,00	255.849.607.000,00	0,00	255.849.607.000,00	100,00	
3	4 3 4 01 06	Dana LOAN WISMP 2	880.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 3 5	Bantuan Keuangan di Provinsi / Pemda Lainnya						PPKD
1	4 3 5 01	Bantuan Keuangan di Prop. / Pemda Lainnya	48.969.470.000,00	48.769.470.000,00	0,00	48.769.470.000,00	99,59	
	4 3 6	Dana Bagi Hasil Retribusi	167.488.692,00	122.704.508,00	119.338.376,00	242.042.884,00	144,51	PPKD
	4 3 6 01	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi Sendiri						
1	4 3 6 01 01	Dana Bagi Hasil Retribusi IMTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	4 3 6 01 02	Dana Bagi Hasil dari Bea Tera	0,00	0,00	85.750.236,00	85.750.236,00	0,00	
3	4 3 6 01 03	Dana Bagi Hasil Retribusi Perizinan Kayu Jati	167.488.692,00	122.704.508,00	33.588.140,00	156.292.648,00	93,32	

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
PAK KABUPATEN JEMBER APBD TAHUN ANGGARAN 2012  
S/D TANGGAL 31 Desember 2012

hal. 6

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	237.881.881.826,31	231.768.395.506,34	24.036.379.577,38	255.804.775.083,72	107,53	
	4 1 1	Hasil Pajak Daerah	50.694.817.000,00	49.945.765.999,00	5.201.348.712,00	55.147.114.711,00	108,78	
	4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	40.699.994.000,00	35.151.552.075,00	5.265.560.782,00	40.417.112.857,00	99,30	
	4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.225.383.196,31	13.051.954.741,31	2.173.428.457,86	15.225.383.199,17	100,00	
	4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	131.261.487.628,00	133.619.122.691,03	11.396.041.625,52	145.015.164.316,55	110,48	
II	4 2	DANA PERIMBANGAN	1.461.556.235.816,00	1.434.018.685.874,00	30.091.714.834,00	1.484.110.400.708,00	101,54	
	4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	86.895.731.916,00	83.199.366.874,00	26.250.529.834,00	109.449.896.708,00	125,96	
	4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	76.640.869.408,00	69.991.758.452,00	19.491.746.275,00	89.483.504.727,00	116,76	
	4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	10.254.862.408,00	13.207.608.422,00	6.758.783.559,00	19.966.391.981,00	194,70	
	4 2 2	Dana Alokasi	1.374.660.504.000,00	1.350.819.319.000,00	23.841.185.000,00	1.374.660.504.000,00	100,00	
	4 2 2 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.279.295.764.000,00	1.279.295.764.000,00	0,00	1.279.295.764.000,00	100,00	
	4 2 2 3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	95.364.740.000,00	71.523.555.000,00	23.841.185.000,00	95.364.740.000,00	100,00	
III	4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	410.588.779.583,00	380.599.295.568,06	25.575.747.501,00	406.175.043.069,00	98,93	
	4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	92.905.003.891,00	64.040.514.060,00	25.456.409.125,00	89.496.923.185,00	96,33	
	4 3 4	Dana Penyesuaian dan Ekonomi Khusus	268.546.817.000,00	267.686.607.000,00	0,00	267.686.607.000,00	99,67	
	4 3 5	Dana Bantuan Keuangan dari Prop/Pemda lainnya	48.969.470.000,00	48.769.470.000,00	0,00	48.769.470.000,00	99,59	
	4 3 6	Dana Bagi Hasil Retribusi	157.486.692,00	122.704.508,00	119.338.376,00	242.042.884,00	144,51	
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>2.110.026.697.225,31</b>	<b>2.046.386.376.948,34</b>	<b>99.703.841.912,38</b>	<b>2.146.090.218.860,72</b>	<b>101,71</b>	

07 Januari 2013  
 REPUBLIK INDONESIA  
 KABUPATEN JEMBER  
 DINAS PENDAPATAN  
 Drs. SUPRPTO, MM.  
 Sekretaris Utama Muda  
 031-86721 198603 1 011

LAMPIRAN 8



**DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**  
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

**DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PAK) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013 S/D TANGGAL 31 Desember 2013**

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4		PENDAPATAN DAERAH	2.378.874.220.186,50	2.254.543.802.026,02	111.827.037.504,66	2.366.370.839.530,68	99,49	
4 1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.845.078.814,50	276.447.194.387,02	31.936.155.917,66	308.383.350.304,68	101,49	
4 1 1		HASIL PAJAK DAERAH	86.081.000.000,00	84.763.934.501,05	10.424.209.908,00	95.188.144.409,05	110,58	
1	4 1 1 1 01	Pajak Hotel						DIPENDA
	4 1 1 1 01 15	- Hotel	1.450.000.000,00	1.878.105.490,00	247.438.795,00	2.125.544.285,00	146,59	
2	4 1 1 1 02	Pajak Restoran						DIPENDA
	4 1 1 1 02 01	- Restoran	4.500.000.000,00	5.280.349.738,29	880.206.911,00	6.160.556.647,29	136,90	
3	4 1 1 1 03	Pajak Hiburan						DIPENDA
	4 1 1 1 03 20	- Pajak Hiburan	425.000.000,00	632.519.138,50	82.752.209,00	715.271.347,50	168,30	
4	4 1 1 1 04	Pajak Reklame						DIPENDA
	4 1 1 1 04 11	- Pajak Reklame	4.100.000.000,00	5.879.400.538,00	262.050.778,00	6.141.451.316,00	149,79	
5	4 1 1 1 05	Pajak Penertangan Jalan (PPJ)						PT. PLN
	4 1 1 1 05 01	- Pajak Penertangan Jalan PT. PLN	34.200.000.000,00	34.994.076.159,00	3.719.091.925,00	38.713.168.084,00	113,20	
	4 1 1 1 05 01	- Pajak Penertangan Jalan Non - PLN	150.000.000,00	153.260.868,00	38.304.537,00	191.615.405,00	127,74	
			34.350.000.000,00	35.147.337.027,00	3.757.448.462,00	38.904.785.489,00	113,26	
6	4 1 1 1 07	Pajak Parkir						DIPENDA
	4 1 1 1 07 01	- Pajak Parkir	81.000.000,00	83.548.390,00	14.456.100,00	98.005.490,00	120,99	
7	4 1 1 1 08	Pajak Air Tanah						DIPENDA
	4 1 1 1 08 01	- Pajak Air Bawah Tanah	350.000.000,00	313.751.567,00	39.947.978,00	353.699.545,00	101,06	
8	4 1 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						DIPENDA
	4 1 1 1 11 01	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	325.000.000,00	392.894.553,00	45.878.127,00	438.772.680,00	135,01	
9	4 1 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan						DIPENDA
	4 1 1 1 12 01	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	29.000.000.000,00	22.404.465.328,01	3.280.858.950,00	25.685.324.278,01	88,57	
10	4 1 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						DIPENDA
	4 1 1 1 13 01	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.500.000.000,00	12.751.581.735,25	1.813.173.600,00	14.564.755.335,25	126,65	
			11.500.000.000,00	12.751.581.735,25	1.813.173.600,00	14.564.755.335,25	126,65	

hal. 2

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PER JAAH			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	43.333.425.540,00	38.812.705.135,00	5.579.640.896,00	44.192.346.021,00	101,98	
	4 1 2 01	RETRIBUSI JASA UMUM	37.389.202.000,00	31.866.719.313,00	4.796.623.284,00	36.663.342.597,00	98,14	
1	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.750.737.000,00	17.742.200.983,00	2.972.180.474,00	20.714.381.457,00	91,05	
	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di POM	22.750.737.000,00	17.742.200.983,00	2.972.180.474,00	20.714.381.457,00	91,05	
		a. UMUM	2.846.758.000,00	2.579.469.000,00	208.370.000,00	2.787.839.000,00	97,93	DINAS KESEHATAN
		- Rawat Jalan	420.114.000,00	349.295.000,00	27.490.000,00	376.785.000,00	89,69	
		- Rawat Inap	2.153.280.000,00	1.995.010.000,00	159.325.000,00	2.145.335.000,00	99,63	
		- Laboratorium	108.704.000,00	92.606.000,00	7.585.000,00	100.191.000,00	92,12	
		- Ambulance	164.600.000,00	151.555.000,00	13.970.000,00	165.525.000,00	100,56	
		b. JEMBER MEDICAL CENTER	100.165.000,00	87.031.575,00	3.994.500,00	91.026.075,00	90,88	
		c. LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN	15.000.000,00	17.625.000,00	1.625.000,00	19.250.000,00	128,33	
		d. ASKES	1.991.054.000,00	1.844.319.408,00	185.560.974,00	2.009.880.382,00	100,95	
		- Rawat Jalan	1.456.808.000,00	1.447.178.008,00	135.541.274,00	1.582.719.282,00	108,64	
		- Rawat Inap	497.020.000,00	352.165.000,00	25.750.000,00	377.925.000,00	75,04	
		- Jamkesmas	37.226.000,00	44.976.400,00	4.259.700,00	49.236.100,00	132,26	
		e. JAMKESMAS	2.268.096.000,00	1.432.401.000,00	242.655.000,00	1.675.056.000,00	73,86	
		- Rawat Jalan	871.425.000,00	492.870.000,00	75.660.000,00	568.530.000,00	65,24	
		- Rawat Inap	1.012.900.000,00	791.140.000,00	137.865.000,00	929.005.000,00	91,72	
		- Ambulance	383.760.000,00	148.391.000,00	29.130.000,00	177.521.000,00	46,26	
		f. JAMPERSDAL	15.529.874.000,00	11.781.358.000,00	2.349.875.000,00	14.131.330.000,00	91,00	
			22.750.737.000,00	17.742.200.983,00	2.972.180.474,00	20.714.381.457,00	91,05	
2	4 1 2 01 02	Ret. Pelayanan Perumahaan/Kesejahteraan	290.400.000,00	396.119.600,00	17.477.000,00	413.596.600,00	142,42	DPU Cipta Karya
3	4 1 2 01 03	Ret. Penggantian Biaya KTP & Akta Catatan Sipil	65.000.000,00	188.611.000,00	0,00	188.611.000,00	290,17	DISPENSUR
4	4 1 2 01 04	Ret. Pelayanan Pemukiman dan Pengalihan Milyar	600.000,00	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	685,00	DPU Cipta Karya
5	4 1 2 01 05	Ret. Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Utama	8.136.000.000,00	7.793.614.000,00	783.093.000,00	8.576.707.000,00	105,42	DINAS PERHUBUNGAN
6	4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar						DINAS PASAR
		- Pasar Utama	4.500.786.000,00	4.106.347.180,00	429.659.360,00	4.536.006.540,00	100,78	
		- Pasar Hewan	70.000.000,00	60.436.800,00	5.094.000,00	65.530.800,00	93,62	
			4.570.786.000,00	4.166.783.980,00	434.753.360,00	4.601.537.340,00	100,67	
7	4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.197.629.000,00	1.319.366.200,00	123.961.600,00	1.443.327.800,00	120,52	DINAS PERHUBUNGAN
8	4 1 2 01 08	Ret. Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	100,00	DPU Cipta Karya
9	4 1 2 01 11	Ret. Penyediaan dan Penyediaan Kulkas	80.750.000,00	16.625.000,00	14.345.000,00	29.970.000,00	37,00	
		- DPU Cipta Karya dan Tata Ruang	750.000,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	330,67	DPU Cipta Karya
		- Dinas Pasar	50.000.000,00	13.145.000,00	14.345.000,00	27.490.000,00	54,98	DINAS PASAR
10	4 1 2 01 13	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	187.308.850,00	444.922.850,00	632.231.700,00	252,89	DINAS PERHUBUNGAN
11	4 1 2 01 17	Ret. Sewa Rumah Dinas	43.320.000,00	50.480.000,00	4.390.000,00	54.870.000,00	126,66	DINAS PENDUKUNG

hal. 3

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PER. JAJAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4 1 2 02	RETRIBUSI JASA USAHA	8.082.808.540,00	4.341.116.110,00	484.848.273,00	4.825.964.385,00	59,55	
1	4 1 2 02 01	Ret. Pemukiman Kelayakan Daerah						
		- Sewa Tanah dan Bangunan	575.168.540,00	568.584.690,00	12.283.475,00	580.868.165,00	100,99	
		1. Pemukiman Tanah Lurik	185.000.000,00	184.230.415,00	793.475,00	185.013.890,00	100,01	DINAS PENGASIH
		2. Blok Seta Cuna	60.000.000,00	55.550.500,00	10.000.000,00	65.550.500,00	109,25	BAG. UMUM SETKAS
		3. Tanah Pemukiman Kabupaten	330.168.540,00	328.803.775,00	1.500.000,00	330.303.775,00	100,04	BPKA
		- Sewa Ruko	150.000.000,00	194.043.650,00	0,00	194.043.650,00	129,36	DPU BINA MARGA
		- Sewa Alat-Alat Berat	60.000.000,00	60.345.000,00	3.505.000,00	63.870.000,00	106,45	DPU BINA MARGA
		- Sewa Work Shop (KMP)	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPU BINA MARGA
		- Sewa Pengukuran Laboratorium Teknik	25.000.000,00	25.075.000,00	0,00	25.075.000,00	100,30	DPU BINA MARGA
		- Sewa Rumah Dinas	9.840.000,00	9.840.000,00	550.000,00	10.390.000,00	105,59	
		1. Rumah Camat, Diklat, Diperta, Dipenkt, Cedes	4.560.000,00	3.840.000,00	550.000,00	4.390.000,00	95,27	DIPENDA
		2. Rumah Kepala Puskesmas dan Terapi Medis	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00	DINAS KESEHATAN
		3. Rumah Karyawan Persewa	2.400.000,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	130,00	BPKA
			960.008.540,00	857.888.340,00	18.358.475,00	874.246.815,00	91,07	
2	4 1 2 02 02	- Retribusi Pasar Grosir / Perbaikan	100.000.000,00	95.040.000,00	15.960.000,00	102.000.000,00	98,00	DINAS PASAR
3	4 1 2 02 04	- Retribusi Terminal	835.000.000,00	723.869.000,00	90.874.500,00	814.743.500,00	97,55	DINAS PERHUBUNGAN
4	4 1 2 02 05	- Retribusi Tempat Khusus Parkir						
		1. Parkiran	25.000.000,00	29.579.000,00	2.844.000,00	32.423.000,00	129,69	DIPENDA
		2. Rembangan	23.000.000,00	29.793.000,00	3.974.000,00	33.767.000,00	146,81	DIPENDA
		3. Kelok Agung	20.000.000,00	17.909.000,00	2.115.000,00	20.024.000,00	100,12	DIPENDA
		4. Dinas Kesehatan	2.400.000,00	2.750.000,00	250.000,00	3.000.000,00	125,00	DINAS KESEHATAN
		5. Dinas Pasar	180.000.000,00	178.182.000,00	7.759.000,00	185.941.000,00	103,86	DINAS PASAR
		6. Dinas Perhubungan	29.400.000,00	25.800.000,00	1.000.000,00	26.800.000,00	91,18	DINAS PERHUBUNGAN
			278.800.000,00	288.013.000,00	17.842.000,00	302.855.000,00	108,28	
5	4 1 2 02 06	Ret. Tempat Penghapusan/PengangkutanVita						
		- Rembangan	550.000.000,00	441.344.000,00	72.490.000,00	513.834.000,00	93,42	DIPENDA
		- Kabin Agung	400.000.000,00	337.635.520,00	34.789.300,00	372.424.820,00	93,11	DIPENDA
		- Wana Daerah Poljanud	40.000.000,00	28.750.000,00	1.250.000,00	30.000.000,00	75,00	BAG. UMUM SETKAS
			990.000.000,00	807.729.520,00	108.529.300,00	916.258.820,00	92,55	
6	4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)						
		- Ret. Rumah Potong Hewan (RPH)	146.000.000,00	122.158.000,00	20.286.000,00	142.444.000,00	97,56	DIPERKEL
			146.000.000,00	122.158.000,00	20.286.000,00	142.444.000,00	97,56	
7	4 1 2 02 10	Retribusi Tempat Rekreasi & Club Raga						
		- Wido-ido	250.000.000,00	242.448.500,00	42.995.500,00	285.445.000,00	114,18	DIPENDA
		- Palanca	525.000.000,00	438.776.000,00	61.251.000,00	500.030.000,00	95,24	DIPENDA
		- Kabin Permandian Pemandangan	477.000.000,00	403.057.000,00	53.513.000,00	456.570.000,00	95,72	DIPENDA
		- Kabin Permandian Kabin Agung	350.000.000,00	291.080.000,00	36.032.500,00	327.112.500,00	93,46	DIPENDA
		- GOR, Lap. Teres PKPSD dan Stadion se-Kab. Jember	120.000.000,00	83.253.750,00	21.105.000,00	104.358.750,00	86,97	KAMPORA
			1.722.000.000,00	1.498.618.250,00	214.888.000,00	1.673.516.250,00	97,18	
4 1 2 02		RETRIBUSI PERDIKAS TERKAIT	891.415.000,00	2.404.869.712,00	298.168.327,00	2.703.038.039,00	303,23	
1	4 1 2 02 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IM)	642.000.000,00	2.272.438.492,00	276.484.327,00	2.548.902.819,00	397,03	
		- Ret. Izin Mendirikan Bangunan (DPU Cipta Karya)	625.000.000,00	2.272.438.492,00	276.484.327,00	2.548.902.819,00	407,52	DPU OPTA KARYA
		- Ret. Peralihan Memara Telekomunikasi (Diput)	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

hal. 4

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENCAJARAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	4 1 2 01 01	Retribusi Iklan Gangguan	200.000.000,00	86.095.020,00	16.000.000,00	102.095.020,00	51,05	KTR LINGKARUP
3	4 1 2 01 04	Retribusi Iklan Trojak	39.415.000,00	43.136.200,00	5.905.000,00	48.741.200,00	123,66	DINAS PERKUBINGKAR
4	4 1 2 01 05	Retribusi Iklan Usaha Perkotaan	10.000.000,00	3.200.000,00	100.000,00	3.300.000,00	33,00	DISPERHEL
4 1 3		<b>HASIL PENGELOLAAN KEKATAAN DAERAH</b>	<b>11.411.667.410,50</b>	<b>9.895.589.612,50</b>	<b>1.716.077.798,56</b>	<b>11.411.667.411,06</b>	<b>100,00</b>	
		<b>TANGGUNGJAWAB</b>						
4 1 3 01		Bagian Lata atau Penyertaan Modal						
		<b>Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD</b>	<b>11.411.667.410,50</b>	<b>9.895.589.612,50</b>	<b>1.716.077.798,56</b>	<b>11.411.667.411,06</b>	<b>100,00</b>	
1	4 1 3 01 01	- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PDAM
2	4 1 3 01 02	- Perusahaan Daerah Bank Jember	4.445.589.612,50	4.445.589.612,50	0,00	4.445.589.612,50	100,00	BPJA
3	4 1 3 01 05	- Perusahaan Daerah Perikanan (PDP)	6.966.077.798,00	5.250.000.000,00	1.716.077.798,56	6.966.077.798,56	100,00	PDP
4 1 4		<b>LAIN-LAIN PEND. ADL DAERAH YG SAH</b>	<b>163.018.985.864,00</b>	<b>143.374.968.138,47</b>	<b>14.216.227.325,10</b>	<b>157.591.192.463,57</b>	<b>96,67</b>	
1	4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dibebankan	547.500.000,00	260.670.000,00	106.580.000,00	417.350.000,00	76,21	
4 1 4 01 13		Penjualan Hasil Pertanian	375.000.000,00	138.070.000,00	116.680.000,00	254.750.000,00	67,93	DINAS PERTANIAN
4 1 4 01 16		Penjualan Hasil Perikanan	37.500.000,00	33.500.000,00	4.000.000,00	37.500.000,00	100,00	DISPERHEL
4 1 4 01 17		Penjualan Hasil Perikanan	125.000.000,00	89.100.000,00	35.900.000,00	125.000.000,00	100,00	DISPERHEL
4 1 4 01 04		Penjualan Hasil Lelang Barang Bekas Banglar	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DISPERHEL
2	4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro						
4 1 4 02 01		- Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.000,00	6.144.630.952,87	365.412.889,11	6.510.043.841,98	186,00	BPJA
3	4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito						
4 1 4 03 01		- Bunga Deposito pada Bank Jember	12.500.000.000,00	15.961.815.070,12	1.746.232.878,07	17.708.047.948,19	141,66	BPJA
4	4 1 4 04	Penerimaan Lain-Lain						
4 1 4 04 01		- Penerimaan Lain-Lain	0,00	2.327.344.379,48	673.886.243,92	3.001.230.623,40	0,00	BPJA
5	4 1 4 10	Pendapatan Berikat Layanan Umum (BLU)	146.471.485.864,00	118.680.504.736,00	11.274.113.314,00	129.954.620.050,00	88,72	
4 1 4 10 01		- Retribusi Pelayanan RSD Bangun	18.271.485.864,00	14.089.010.887,00	1.123.677.182,00	15.192.687.949,00	83,15	
4 1 4 10 01		- Retribusi Pelayanan RSD Kiblat	8.200.000.000,00	7.810.129.331,00	875.472.343,00	8.685.601.674,00	103,48	
4 1 4 10 01		- Retribusi Pelayanan RSD Di Suburab	120.000.000.000,00	87.061.364.738,00	8.274.966.787,00	106.278.330.525,00	88,56	
4 2		<b>DANA PEROMBANGAN</b>	<b>1.595.981.135.232,00</b>	<b>1.517.586.317.977,00</b>	<b>71.201.666.799,00</b>	<b>1.588.889.984.736,00</b>	<b>99,58</b>	
4 2 1		<b>Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>90.567.533.232,00</b>	<b>73.641.449.977,00</b>	<b>23.233.862.759,00</b>	<b>96.875.112.736,00</b>	<b>106,96</b>	
4 2 1 01		<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>76.531.630.541,50</b>	<b>60.618.778.928,00</b>	<b>18.910.893.050,00</b>	<b>80.529.671.978,00</b>	<b>105,22</b>	
1	4 2 1 01 01	- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	32.381.682.119,00	29.682.315.980,00	7.562.790.485,00	37.445.106.465,00	115,64	BPJA
2	4 2 1 01 01	- Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOP Dalam Negeri dan PPh-Pd 21	23.736.796.087,00	14.242.058.648,00	4.483.627.198,00	18.725.686.846,00	78,89	BPJA
3	4 2 1 01 04	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	20.413.152.335,00	16.494.403.300,00	7.864.475.367,00	24.358.878.667,00	119,33	BPJA
4 2 1 02		<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>14.035.902.691,00</b>	<b>13.022.671.049,00</b>	<b>3.222.788.709,00</b>	<b>16.345.448.758,00</b>	<b>116,45</b>	
1	4 2 1 02 02	- Penerimaan Sumber Daya Ikan (PSDI)	1.289.782.185,00	1.180.192.880,00	210.257.427,00	1.390.450.317,00	107,81	BPJA
2	4 2 1 02 04	- Iuran Teluk / Land Rent	15.002.700,00	3.783.272,00	0,00	3.783.272,00	25,22	BPJA
3	4 2 1 02 05	- Iuran Eksploitasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	21.719.000,00	15.986.270,00	- 15.527.994,00	31.517.264,00	145,11	BPJA
4 2 1 02 06		- Pengukuran Pengusahaan Perikanan	289.738.431,00	250.820.395,00	96.579.478,00	347.408.873,00	119,90	BPJA
5	4 2 1 02 08	- Peternakan Minyak Bumi	11.663.901.000,00	10.374.210.874,00	2.117.531.480,00	12.491.742.354,00	107,10	BPJA
6	4 2 1 02 09	- Peternakan Gas Bumi	738.838.000,00	1.197.665.348,00	882.873.330,00	2.080.538.678,00	281,60	BPJA
7	4 2 1 02 10	- Peternakan Panas Bumi	16.921.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BPJA

hal. 5

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PELAJAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4 2 2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.417.603.982.000,00	1.417.603.982.000,00	0,00	1.417.603.982.000,00	100,00	BPJA
1	4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	1.417.603.982.000,00	1.417.603.982.000,00	0,00	1.417.603.982.000,00	100,00	
	4 2 3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	87.809.628.000,00	26.342.886.000,00	48.068.004.000,00	74.418.890.000,00	84,74	BPJA
1	4 2 3 01 01	- DAK Bidang Pendidikan	53.594.920.000,00	16.078.478.000,00	24.117.714.000,00	40.196.190.000,00	75,00	
2	4 2 3 01 02	- DAK Bidang Pelayanan Rakyat	2.024.480.000,00	607.338.000,00	1.417.122.000,00	2.024.480.000,00	100,00	
3	4 2 3 01 04	- DAK Bidang Jalan	6.827.800.000,00	2.048.340.000,00	4.779.460.000,00	6.827.800.000,00	100,00	
4	4 2 3 01 05	- DAK Bidang Energi	3.772.950.000,00	1.131.885.000,00	2.641.065.000,00	3.772.950.000,00	100,00	
5	4 2 3 01 06	- DAK Bidang Air Minum	1.337.840.000,00	401.352.000,00	936.488.000,00	1.337.840.000,00	100,00	
6	4 2 3 01 07	- DAK Bidang Sanitasi	1.727.330.000,00	518.199.000,00	1.209.131.000,00	1.727.330.000,00	100,00	
7	4 2 3 01 08	- DAK Bidang Pertanian	6.418.320.000,00	1.925.496.000,00	4.492.824.000,00	6.418.320.000,00	100,00	
8	4 2 3 01 09	- DAK Bidang Keluarga Berencana	1.124.290.000,00	337.287.000,00	787.003.000,00	1.124.290.000,00	100,00	
9	4 2 3 01 11	- DAK Bidang Pelayanan Bidang Formal	4.275.050.000,00	1.282.515.000,00	2.992.535.000,00	4.275.050.000,00	100,00	
10	4 2 3 01 12	- DAK Bidang Pertambangan	899.360.000,00	269.808.000,00	629.552.000,00	899.360.000,00	100,00	
11	4 2 3 01 13	- DAK Bidang Kewasmatan Transportasi Darat	411.400.000,00	123.420.000,00	287.980.000,00	411.400.000,00	100,00	
12	4 2 3 01 15	- DAK Bidang Kesehatan	1.288.410.000,00	386.523.000,00	901.887.000,00	1.288.410.000,00	100,00	
13	4 2 3 01 16	- DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	4.107.490.000,00	1.232.247.000,00	2.875.243.000,00	4.107.490.000,00	100,00	
	4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	478.748.006.140,00	460.908.289.662,00	8.589.214.828,00	468.097.504.490,00	97,98	
	4 3 1	Pendapatan Hibah	1.101.880.000,00	0,00	481.647.500,00	481.647.500,00	43,71	BPJA
	4 3 1 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.101.880.000,00	0,00	481.647.500,00	481.647.500,00	43,71	
1	4 3 1 01 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.101.880.000,00	0,00	481.647.500,00	481.647.500,00	43,71	
	4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	109.393.899.620,00	93.178.764.959,00	8.167.567.328,00	101.286.332.287,00	92,59	
	4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi	109.393.899.620,00	93.178.764.959,00	8.167.567.328,00	101.286.332.287,00	92,59	
1	4 3 3 01 01	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.494.320.506,00	26.899.461.315,00	2.297.429.596,00	29.196.890.911,00	92,71	BPJA
2	4 3 3 01 03	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	33.377.834.663,00	28.229.226.213,00	2.574.304.223,00	30.803.530.436,00	92,29	BPJA
3	4 3 3 01 05	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	44.284.578.629,00	37.845.942.118,00	3.219.319.256,00	41.065.260.374,00	92,73	BPJA
4	4 3 3 01 09	- Pajak Air Permukaan	237.165.822,00	204.135.313,00	16.515.253,00	220.650.566,00	93,04	BPJA
	4 3 4	Dana Penyesuaian dan Ekonomi Khusus	346.966.002.828,00	345.099.902.500,00	0,00	345.099.902.500,00	99,72	BPJA
	4 3 4 01	Dana Penyesuaian	346.966.002.828,00	345.099.902.500,00	0,00	345.099.902.500,00	99,72	
1	4 3 4 01 02	Pendapatan DP Tamb. Penghasilan Guro PNG	3.148.237.500,00	3.148.237.500,00	0,00	3.148.237.500,00	100,00	
2	4 3 4 01 03	Pendapatan Tunjangan Profesi Guru PNG	342.917.765.328,00	341.951.665.000,00	0,00	341.951.665.000,00	99,72	
3	4 3 4 01 05	Dana (DAS) WISAP 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 3 5	Bantuan Keuangan di Proritas / Pemda Lainnya						BPJA
1	4 3 5 01	Bantuan Keuangan di Prop. / Pemda Lainnya	22.018.735.000,00	22.062.160.000,00	0,00	22.062.160.000,00	100,20	
	4 3 6	Dana Bagi Hasil Retribusi	167.488.692,00	167.462.203,00	0,00	167.462.203,00	99,98	BPJA
	4 3 6 01	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi Sendiri	167.488.692,00	167.462.203,00	0,00	167.462.203,00	99,98	
1	4 3 6 01 03	Dana Bagi Hasil Retribusi Pajak Kayu Jati (SP R)	167.488.692,00	167.462.203,00	0,00	167.462.203,00	99,98	

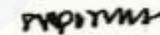
REKAPITULASI : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
(PAK) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013  
S/D TANGGAL 31 Desember 2013

hal. 8

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.845.078.814,50	278.447.194.387,02	31.836.155.917,68	308.383.350.304,68	101,49	
	4 1 1	Hasil Pajak Daerah	86.081.000.000,00	84.763.934.501,05	10.424.209.908,00	95.188.144.409,05	110,58	
	4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	43.333.425.540,00	38.612.705.135,00	5.579.640.886,00	44.192.346.021,00	101,98	
	4 1 3	Hasil Pengikutan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.411.667.410,00	9.895.589.612,50	1.716.077.798,56	11.411.667.411,06	100,00	
	4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	163.018.985.864,00	143.374.865.138,47	14.216.227.325,10	157.591.182.463,57	96,67	
II	4 2	DANA PERWANGAN	1.596.961.135.232,00	1.517.588.317.977,00	71.301.666.759,00	1.588.889.984.736,00	99,56	
	4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	90.567.533.232,00	73.641.449.977,00	23.233.662.759,00	96.875.112.736,00	106,96	
	4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	76.531.630.541,00	60.618.778.928,00	19.910.893.050,00	80.529.671.978,00	105,22	
	4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14.035.902.691,00	13.022.671.049,00	3.322.769.709,00	16.345.440.758,00	116,45	
	4 2 2	Dana Alokasi	1.505.413.602.000,00	1.443.946.868.000,00	48.068.004.000,00	1.492.014.872.000,00	99,11	
	4 2 2 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.417.603.982.000,00	1.417.603.982.000,00	0,00	1.417.603.982.000,00	100,00	
	4 2 2 3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	87.809.620.000,00	26.342.886.000,00	48.068.004.000,00	74.410.890.000,00	84,74	
III	4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	478.748.006.140,00	460.508.289.862,00	8.589.214.828,00	469.097.504.490,00	97,98	
	4 3 1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	1.101.880.000,00	0,00	481.647.500,00	461.647.500,00	43,71	
	4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	199.393.899.520,00	93.178.764.959,00	8.107.567.328,00	101.286.332.287,00	52,59	
	4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	346.066.002.828,00	345.099.902.500,00	0,00	345.099.902.500,00	99,72	
	4 3 5	Dana Bantuan Keuangan dari Prop/Penda lainnya	22.018.735.000,00	22.062.160.000,00	0,00	22.062.160.000,00	100,20	
	4 3 6	Dana Bagi Hasil Retribusi	187.488.692,00	187.462.203,00	0,00	187.462.203,00	99,98	
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>2.378.574.228.186,50</b>	<b>2.254.643.802.026,02</b>	<b>111.827.037.504,68</b>	<b>2.366.370.839.530,68</b>	<b>99,48</b>	

Jember, 10 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
KABUPATEN JEMBER



Drs. SUPRAPTO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610721 198603 1 011

LAMPIRAN 9



DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014 S/D TANGGAL 31 Desember 2014

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4		PENDAPATAN DAERAH	2.836,047,818,784.00	2,650,773,448,872.23	147,838,717,329.48	2,798,612,164,201.89	98.68	
4 1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	504,157,202,841.00	395,943,353,966.23	45,662,263,256.48	441,605,617,222.69	87.59	
4 1 1		HASIL PAJAK DAERAH	124,150,000,000.00	105,542,436,721.50	10,936,120,794.00	116,578,557,515.50	93.90	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel						DIPENDA
	4 1 1 01 15	- Hotel	2,200,000,000.00	2,964,152,250.00	345,102,470.00	3,309,254,720.00	150.42	
			2,200,000,000.00	2,964,152,250.00	345,102,470.00	3,309,254,720.00	150.42	
2	4 1 1 02	Pajak Restoran						DIPENDA
	4 1 1 02 01	- Restoran	5,500,000,000.00	6,585,073,308.00	972,397,117.00	7,557,470,425.00	137.41	
			5,500,000,000.00	6,585,073,308.00	972,397,117.00	7,557,470,425.00	137.41	
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan						DIPENDA
	4 1 1 03 20	- Pajak Hiburan	1,000,000,000.00	817,398,615.00	111,802,624.00	929,201,239.00	92.92	
			1,000,000,000.00	817,398,615.00	111,802,624.00	929,201,239.00	92.92	
4	4 1 1 04	Pajak Reklame						DIPENDA
	4 1 1 04 11	- Pajak Reklame	4,750,000,000.00	5,048,363,963.00	360,358,939.00	5,408,722,902.00	113.87	
			4,750,000,000.00	5,048,363,963.00	360,358,939.00	5,408,722,902.00	113.87	
5	4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)						PT. PLN
	4 1 1 05 01	- Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	40,000,000,000.00	40,526,680,916.00	4,128,724,143.00	44,655,405,069.00	111.64	
	4 1 1 05 01	- Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	500,000,000.00	193,267,506.00	1,810,679.00	195,078,185.00	39.02	
			40,500,000,000.00	40,719,948,422.00	4,130,534,822.00	44,850,483,244.00	110.74	
6	4 1 1 07	Pajak Parkir						DIPENDA
	4 1 1 07 01	- Pajak Parkir	200,000,000.00	176,136,200.00	27,766,350.00	203,902,550.00	101.95	
			200,000,000.00	176,136,200.00	27,766,350.00	203,902,550.00	101.95	
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah						DIPENDA
	4 1 1 08 01	- Pajak Air Tanah	1,000,000,000.00	349,483,173.00	37,549,825.00	387,032,998.00	38.70	
			1,000,000,000.00	349,483,173.00	37,549,825.00	387,032,998.00	38.70	
8	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						DIPENDA
	4 1 1 11 07	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,000,000,000.00	496,101,211.00	146,837,440.00	642,938,651.00	32.15	
			2,000,000,000.00	496,101,211.00	146,837,440.00	642,938,651.00	32.15	
9	4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan						DIPENDA
	4 1 1 12 01	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50,000,000,000.00	32,695,813,506.00	2,828,067,312.00	35,523,880,818.00	71.05	
			50,000,000,000.00	32,695,813,506.00	2,828,067,312.00	35,523,880,818.00	71.05	
10	4 1 1 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan						DIPENDA
	4 1 1 13 01	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17,000,000,000.00	15,789,966,073.50	1,975,703,895.00	17,765,669,968.50	104.50	
			17,000,000,000.00	15,789,966,073.50	1,975,703,895.00	17,765,669,968.50	104.50	

hal. 2

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
4	1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	68,473,284,456.00	58,485,188,853.00	4,097,568,543.00	62,582,757,396.00	91.40	
4	1 2 01	RETRIBUSI JASA UMUM	60,844,900,100.00	52,673,202,670.00	2,940,594,245.00	55,613,796,915.00	91.70	
1	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	42,217,213,000.00	36,542,970,375.00	919,205,375.00	37,562,175,750.00	88.97	
4	1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM	72,966,201,000.00	67,391,958,375.00	919,205,375.00	68,311,163,750.00	93.62	
		a. UMUM	3,114,065,000.00	2,753,151,000.00	301,287,000.00	3,054,438,000.00	98.09	DINAS KESEHATAN
		- Rawat Jalan	659,000,000.00	594,533,000.00	76,186,000.00	670,719,000.00	101.78	
		- Rawat Inap	2,218,525,000.00	1,950,590,000.00	205,930,000.00	2,156,520,000.00	97.21	
		- Laboratorium	109,815,000.00	90,658,000.00	7,146,000.00	97,804,000.00	89.06	
		- Ambulance	126,725,000.00	117,370,000.00	12,025,000.00	129,395,000.00	102.11	
		b. LABKESDA	95,000,000.00	68,971,375.00	5,993,375.00	74,964,750.00	78.91	
		c. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	30,748,988,000.00	30,748,988,000.00	0.00	30,748,988,000.00	100.00	
		d. Dana Non Kapital JKN	8,259,160,000.00	3,071,860,000.00	611,925,000.00	3,683,785,000.00	44.60	
			42,217,213,000.00	36,542,970,375.00	919,205,375.00	37,562,175,750.00	88.97	
2	4 1 2 01 02	Ret. Pelayanan Pemukiman/Rubahran	290,400,000.00	482,963,500.00	21,278,000.00	504,181,500.00	173.62	DPU CIPTA KARYA
3	4 1 2 01 04	Ret. Pelayanan Pemukiman dan Pengalihan Melay	600,000.00	4,510,000.00	1,400,000.00	6,010,000.00	1,001.67	DPU CIPTA KARYA
4	4 1 2 01 05	Ret. Pelayanan Pasar Berlinggaman	9,226,226,100.00	8,114,372,000.00	910,396,000.00	9,024,768,000.00	97.82	DINAS PERHUBUNGAN
5	4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar						DINAS PASAR
		- Pasar Umum	4,550,000,000.00	4,104,773,920.00	413,523,870.00	4,518,297,790.00	99.30	
		- Pasar Hewan	70,000,000.00	48,577,500.00	4,912,000.00	53,589,500.00	76.56	
		- Pasar Karceng Bani	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4,720,000,000.00	4,153,451,420.00	418,435,870.00	4,571,887,290.00	96.86	
6	4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,418,991,000.00	1,287,701,000.00	130,477,900.00	1,418,118,600.00	99.94	DINAS PERHUBUNGAN
7	4 1 2 01 08	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	BPBD
8	4 1 2 01 11	Ret. Penyediaan dan Penyediaan Korus	60,750,000.00	66,745,000.00	22,103,000.00	88,852,000.00	146.28	
		- DPU Cipta Karya dan Tata Ruang	750,000.00	3,700,000.00	1,100,000.00	4,800,000.00	640.00	DPU CIPTA KARYA
		- Dinas Pasar	60,000,000.00	63,045,000.00	21,003,000.00	84,052,000.00	140.09	DINAS PASAR
9	4 1 2 01 13	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	2,000,000,000.00	1,539,159,900.00	471,489,900.00	2,010,649,800.00	100.53	DINAS PERHUBUNGAN
10	4 1 2 01 15	Ret. Sewa Tanah dan Bangunan Kantor	661,000,000.00	330,385,475.00	38,868,500.00	369,253,975.00	55.86	BPKA
11	4 1 2 01 17	Ret. Sewa Rumah Dinas	45,720,000.00	50,840,000.00	3,060,000.00	53,900,000.00	117.89	
		- Rumah Dinas Guru	43,320,000.00	48,440,000.00	3,060,000.00	51,500,000.00	118.88	DINAS PENDIDIKAN
		- Rumah Dinas Karyawan Penda	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	100.00	BPKA

hal. 3

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALIS. PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4 1 2 02	RETRIBUSI JASA USAHA	5,561,104,356.00	4,115,348,044.00	659,409,995.00	4,774,758,039.00	85.86	
1	4 1 2 02 01	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah						
		- Sewa Tanah dan Bangunan	484,264,356.00	382,863,394.00	68,539,745.00	451,403,139.00	93.21	
		1. Pemakaian Tanah Lambikan	434,264,356.00	332,863,394.00	68,539,745.00	401,403,139.00	92.43	DINAS PENGARAAN
		2. Baku Serba Guna	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	100.00	BAG. UMUM SETKAB
	4 1 2 02 01	- Sewa Ruang	500,000,000.00	227,886,200.00	19,623,250.00	247,509,450.00	49.50	DPU BINA MARGA
	4 1 2 02 01	- Sewa Alat-Alat Berat	250,000,000.00	52,635,000.00	8,055,000.00	60,690,000.00	24.28	DPU BINA MARGA
	4 1 2 02 01	- Sewa Work Shop (JMP)	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DPU BINA MARGA
	4 1 2 02 01	- Sewa Penggunaan Laboratorium Teknik	25,000,000.00	42,150,000.00	0.00	42,150,000.00	168.60	DPU BINA MARGA
	4 1 2 02 01	- Sewa Rumah Dinas	7,440,000.00	5,590,000.00	1,550,000.00	7,140,000.00	96.97	
		1. Rutin Camat, Dehbitur, Diperta, Disperkel, Cokor	4,560,000.00	2,710,000.00	1,550,000.00	4,260,000.00	93.42	DIPENDA
		2. Rutin Kepala Puskesmas dan Tenaga Medis	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	100.00	DINAS KESEHATAN
			1,406,704,356.00	711,124,594.00	97,767,995.00	808,892,589.00	57.50	
2	4 1 2 02 02	- Retribusi Pasar Grosir / Persewaan	150,000,000.00	51,600,000.00	4,500,000.00	56,100,000.00	37.40	DINAS PASAR
3	4 1 2 02 04	- Retribusi Terminal	835,000,000.00	668,839,500.00	150,732,000.00	819,571,500.00	98.15	DINAS PERHUBUNGAN
4	4 1 2 02 05	- Retribusi Tempat Khusus Parkir						
		1. Patroli	25,000,000.00	19,823,000.00	4,660,000.00	24,483,000.00	97.93	DIPENDA
		2. Rembangan	40,000,000.00	36,919,000.00	3,142,000.00	40,061,000.00	100.15	DIPENDA
		3. Kanton Agung	25,000,000.00	22,416,000.00	2,618,000.00	25,034,000.00	100.14	DIPENDA
		4. Dinas Kesehatan	2,400,000.00	2,100,000.00	300,000.00	2,400,000.00	100.00	DINAS KESEHATAN
		5. Dinas Pasar	190,000,000.00	169,506,000.00	12,755,000.00	182,261,000.00	95.93	DINAS PASAR
			282,400,000.00	250,764,000.00	23,475,000.00	274,239,000.00	97.11	
5	4 1 2 02 06	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila						
		- Rembangan	550,000,000.00	398,625,000.00	44,100,000.00	442,725,000.00	80.50	DIPENDA
		- Kanton Agung	400,000,000.00	347,974,950.00	39,771,000.00	387,745,950.00	96.94	DIPENDA
		- Wana Daerah Pojankut	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	100.00	BAG. UMUM SETKAB
			975,000,000.00	771,599,950.00	83,871,000.00	855,470,950.00	87.74	
6	4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)						
		- Ret. Rumah Potong Hewan (RPH)	150,000,000.00	131,822,000.00	18,156,000.00	149,978,000.00	99.99	
			150,000,000.00	131,822,000.00	18,156,000.00	149,978,000.00	99.99	
7	4 1 2 02 10	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga						
		- Wau sibi	250,000,000.00	225,021,000.00	50,333,000.00	275,354,000.00	110.14	DIPENDA
		- Patroli	525,000,000.00	407,760,000.00	96,090,000.00	503,850,000.00	96.97	DIPENDA
		- Kanton Permandian Rembangan	477,000,000.00	454,622,500.00	42,502,500.00	497,125,000.00	104.22	DIPENDA
		- Kanton Permandian Kanton Agung	350,000,000.00	337,264,500.00	26,657,500.00	363,922,000.00	103.98	DIPENDA
		- GOR, Lap, Tenis PPKSO dan Stadion se-Kab. Jember	160,000,000.00	194,930,000.00	65,325,000.00	170,255,000.00	106.41	KANPORA
			1,762,000,000.00	1,529,598,000.00	280,908,000.00	1,810,506,000.00	102.75	
8	4 1 2 03	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	2,267,280,000.00	1,696,638,139.00	497,564,303.00	2,194,202,442.00	96.78	
1	4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2,017,000,000.00	1,531,667,687.00	462,770,603.00	1,994,438,290.00	98.88	
		- Ret. Ijin Mendirikan Bangunan (DPU. Cipta Karya)	2,000,000,000.00	1,508,763,887.00	462,770,603.00	1,971,534,490.00	98.58	DPU. CIPTA KARYA
		- Ret. Peredaran Menara Telekomunikasi (Distrub)	17,000,000.00	22,903,800.00	0.00	22,903,800.00	134.73	DINAS PERHUBUNGAN

Hal. 4

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALIS PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	4 1 2 00 03	Retribusi Gangguan	200.000.000,00	125.156.652,00	27.243.700,00	152.400.352,00	76,20	KTR, LINGK. HEDUP
3	4 1 2 00 04	Retribusi Iklan Trayek	45.280.000,00	36.038.800,00	4.050.000,00	42.088.800,00	92,99	DINAS PERHUBUNGAN
4	4 1 2 00 05	Retribusi Usaha Perikanan	5.000.000,00	1.775.000,00	3.500.000,00	5.275.000,00	105,50	DISPERKEL
4	4 1 3	JUAL BEL PEKERJAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISahkan	8.493.910.185,00	6.842.913.793,75	1.748.320.573,88	8.591.234.367,63	101,15	
4	4 1 3 01	Bagian Latah atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	8.493.910.185,00	6.842.913.793,75	1.748.320.573,88	8.591.234.367,63	101,15	
1	4 1 3 01 01	- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	100,00	PDAM
2	4 1 3 01 02	- Perusahaan Daerah Bank Jalan	4.445.569.612,00	4.542.913.793,75	0,00	4.542.913.793,75	102,19	BPJA
3	4 1 3 01 05	- Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP)	3.548.320.573,00	1.800.000.000,00	1.748.320.573,88	3.548.320.573,88	100,00	POP
4	4 1 4	LAIN-LAIN PEND. ASLI DAERAH YG BAH	303.946.828.000,00	224.972.814.597,98	28.880.263.245,58	253.853.067.843,56	83,77	
1	4 1 4 01	Hasil Penjualan Asal Daerah Yang Tidak Dipisahkan	33.213.641.000,00	502.921.500,00	416.629.000,00	919.550.500,00	2,77	
4	4 1 4 01 03	Pelepasan Hak Atas Tanah	32.593.501.000,00	228.931.000,00	200.300.000,00	429.231.000,00	1,32	BPJA
4	4 1 4 01 13	Penjualan Hasil Pertanian	435.140.000,00	163.735.500,00	140.966.000,00	304.701.500,00	70,02	DINAS PERTANIAN
4	4 1 4 01 16	Penjualan Hasil Perikanan	45.000.000,00	31.900.000,00	13.708.000,00	45.608.000,00	101,35	DISPERKEL
4	4 1 4 01 17	Penjualan Hasil Perikanan	140.000.000,00	78.355.000,00	61.655.000,00	140.010.000,00	100,01	DISPERKEL
2	4 1 4 02	Penerimaan Jasa Gm						
4	4 1 4 02 01	- Jasa Gm Kas Daerah	3.500.000.000,00	6.798.348.011,86	644.653.338,48	7.443.001.350,34	212,66	BPJA
3	4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito						
4	4 1 4 03 01	- Bunga Deposito pada Bank Jalan	12.500.000.000,00	28.787.842.417,12	4.009.246.568,55	32.797.088.985,67	262,38	BPJA
4	4 1 4	Penerimaan Lain-Lain						
4	4 1 4	- Penerimaan Lain-Lain	0,00	3.185.689.605,60	522.594.002,55	3.708.283.608,15	0,00	BPJA
5	4 1 4	Penerimaan Lain-Lain PAD						
4	4 1 4	- Penerimaan Lain-lain PAD	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DISPERKEL
6	4 1 4	Penerimaan Lain-Lain PAD						
4	4 1 4	- Dana Kredit JKN	33.823.887.000,00	26.198.238.000,00	5.234.505.000,00	31.432.743.000,00	92,93	DINAS KESEHATAN
7	4 1 4 10	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	220.000.000.000,00	159.499.775.063,40	18.052.325.436,00	177.552.100.499,40	80,71	
		- Restitusi Pelayanan RSUD Selang	30.000.000.000,00	17.421.555.478,40	1.513.521.214,00	18.935.076.692,40	63,12	
		- Restitusi Pelayanan RSUD Klaten	15.000.000.000,00	13.624.461.810,00	1.190.691.278,00	14.815.142.888,00	98,77	
		- Restitusi Pelayanan RSUD Dr. Sutawidj	175.000.000.000,00	128.453.757.875,00	15.348.122.794,00	143.801.880.769,00	82,17	
4	2	DANA PERBENDAHARAN	1.749.076.688.581,00	1.684.653.106.045,00	82.194.259.172,00	1.746.847.365.217,00	99,87	
4	2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	121.402.990.581,00	98.545.271.045,00	20.628.496.172,00	119.173.767.217,00	98,16	
4	2 1 01	Bagi Hasil Pajak	92.392.287.994,00	78.168.303.484,00	17.318.769.470,00	95.478.072.954,00	103,34	
1	4 2 1 01 01	- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.253.620.602,00	18.731.762.268,00	4.334.339.143,00	27.066.101.431,00	116,40	BPJA
2	4 2 1 01 03	- Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOP Dalam Negeri dan PPh Pd 21	27.178.473.355,00	17.466.347.156,00	7.740.995.863,00	25.207.344.022,00	92,75	
3	4 2 1 01 04	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	41.960.194.037,00	41.960.194.037,00	1.244.433.464,00	43.204.627.501,00	102,97	
4	2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumbu Daya Alam	29.010.702.587,00	20.386.967.961,00	3.308.726.702,00	23.695.694.363,00	81,68	
1	4 2 1 02 02	- Ponds Sumbu Daya Alam (PSDA)	2.541.023.340,00	1.790.581.243,00	657.757.729,00	2.438.338.972,00	95,96	BPJA
2	4 2 1 02 04	- Irian Tegal / Land Reel	55.061.120,00	38.691.200,00	58.654.992,00	97.346.192,00	176,80	
3	4 2 1 02 05	- Irian Ekspansi dan Irian Eksploitasi / Royalti	118.148.403,00	86.157.016,00	17.990.787,00	106.137.803,00	89,83	
4	4 2 1 02 06	- Pungutan Pengusahaan Perikanan	402.414.486,00	281.690.139,00	101.492.271,00	383.182.410,00	95,22	
5	4 2 1 02 08	- Pertambangan Minyak Bumi	23.113.154.565,00	16.251.217.795,00	2.032.565.519,00	18.283.783.314,00	79,11	
6	4 2 1 02 09	- Pertambangan Gas Bumi	2.783.737.000,00	1.934.815.300,00	440.275.404,00	2.374.891.304,00	85,93	
7	4 2 1 02 10	- Pertambangan Pasir Bumi	17.183.243,00	12.014.268,00	0,00	12.014.268,00	70,00	

hal. 5

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALIS PENERIMAAN		%	UNIT KERJA PEMUNGUT	
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI			JUMLAH S/D BULAN INI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	4 2 2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,539,722,508,000.00	1,539,722,508,000.00	0.00	1,539,722,508,000.00	100.00	BPKA
1	4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	1,539,722,508,000.00	1,539,722,508,000.00	0.00	1,539,722,508,000.00	100.00	
	4 2 3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	87,961,090,000.00	26,385,327,000.00	61,565,763,000.00	87,961,090,000.00	100.00	BPKA
1	4 2 3 01 01	- DAK Bidang Pendidikan	51,038,760,000.00	15,311,628,000.00	35,727,132,000.00	51,038,760,000.00	100.00	
2	4 2 3 01 03	- DAK Bidang Pelayanan Rakyat	1,908,440,000.00	572,532,000.00	1,335,908,000.00	1,908,440,000.00	100.00	
2	4 2 3 01 04	- DAK Bidang Jalan	9,249,130,000.00	2,774,739,000.00	6,474,391,000.00	9,249,130,000.00	100.00	
3	4 2 3 01 05	- DAK Bidang Energi	4,524,000,000.00	1,357,200,000.00	3,166,800,000.00	4,524,000,000.00	100.00	
4	4 2 3 01 06	- DAK Bidang Air Minum	2,390,180,000.00	717,054,000.00	1,673,126,000.00	2,390,180,000.00	100.00	
5	4 2 3 01 07	- DAK Bidang Sanitasi	1,476,430,000.00	442,929,000.00	1,033,501,000.00	1,476,430,000.00	100.00	
6	4 2 3 01 08	- DAK Bidang Pertanian	8,484,400,000.00	2,545,320,000.00	5,939,080,000.00	8,484,400,000.00	100.00	
7	4 2 3 01 09	- DAK Bidang Kelangkaan Berencana	1,172,070,000.00	351,621,000.00	820,449,000.00	1,172,070,000.00	100.00	
8	4 2 3 01 11	- DAK Bidang Pelayanan Bidang Farmasi	3,510,210,000.00	1,053,063,000.00	2,457,147,000.00	3,510,210,000.00	100.00	
9	4 2 3 01 13	- DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat	434,390,000.00	130,317,000.00	304,073,000.00	434,390,000.00	100.00	
10	4 2 3 01 17	- DAK Bidang Kesehatan dan Perikanan	3,783,080,000.00	1,128,924,000.00	2,654,156,000.00	3,783,080,000.00	100.00	
4	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	582,514,025,562.00	590,176,986,861.00	19,982,194,901.00	610,159,181,762.00	104.69	
4	3 1	Pendapatan Hibah	3,331,000,000.00	0.00	1,427,032,450.00	1,427,032,450.00	42.84	BPKA
4	3 1 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah						
1	4 3 1 01 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	3,331,000,000.00	0.00	1,427,032,450.00	1,427,032,450.00	42.84	
4	3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	139,913,653,358.00	152,613,385,157.00	18,251,029,177.00	170,864,414,334.00	122.12	
4	3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	139,913,653,358.00	152,613,385,157.00	18,251,029,177.00	170,864,414,334.00	122.12	
1	4 3 3 01 01	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	43,749,676,154.00	42,882,067,980.00	0.00	42,882,067,980.00	98.02	BPKA
2	4 3 3 01 03	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BENKB)	40,654,341,944.00	40,105,493,057.00	0.00	40,105,493,057.00	98.65	
3	4 3 3 01 05	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	55,184,787,516.00	52,644,635,358.00	0.00	52,644,635,358.00	95.40	
4	4 3 3 01 06	- Pajak Rokok (PR)	0.00	16,613,071,762.00	18,251,029,177.00	34,864,100,939.00	0.00	
5	4 3 3 01 08	- Pajak Air Permukaan	324,667,744.00	367,817,000.00	0.00	367,817,000.00	113.22	
4	3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	416,974,168,500.00	414,816,348,000.00	0.00	414,816,348,000.00	99.48	BPKA
4	3 4 01	Dana Penyesuaian						
1	4 3 4 01 02	Pendapatan DP Tamb. Penghasilan Guru PNS	3,148,237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	4 3 4 01 03	Pendapatan Tunjangan Profesi Guru PNSD	410,825,931,000.00	410,825,931,000.00	0.00	410,825,931,000.00	100.00	
3	4 3 4 01 07	Dana Insentif Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00	100.00	
4	4 3 4 01 08	Dana Proyek Pemda dan Desentralisasi	0.00	990,417,000.00	0.00	990,417,000.00	0.00	
4	3 5	Bantuan Keuangan di Provinsi / Pemda Lainnya						BPKA
1	4 3 5 01	Bantuan Keuangan di Prop. / Pemda Lainnya	22,555,520,000.00	22,707,570,000.00	0.00	22,707,570,000.00	100.67	
4	3 8	Dana Bagi Hasil Retribusi	39,683,704.00	39,683,704.00	304,133,274.00	343,816,978.00	866.39	BPKA
4	3 8 01	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi Sendiri						
1	4 3 8 01 03	Dana Bagi Hasil Retribusi Pajak dan Retribusi Lain	39,683,704.00	39,683,704.00	304,133,274.00	343,816,978.00	866.39	

REKAPITULASI : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014  
S/D TANGGAL 31 Desember 2014

hal. 6

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	504,157,202,641.00	395,943,353,966.23	45,662,263,256.46	441,605,617,222.69	87.59	
	4 1 1	Hasil Pajak Daerah	124,150,000,000.00	105,642,438,721.50	10,936,120,794.00	116,578,557,515.50	93.90	
	4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	68,473,264,456.00	58,485,188,853.00	4,097,566,543.00	62,582,757,396.00	91.40	
	4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,493,910,185.00	6,842,913,793.75	1,748,320,573.88	8,591,234,367.63	101.15	
	4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	303,040,028,000.00	224,972,814,597.98	26,880,253,345.58	253,853,067,943.56	83.77	
II	4 2	DANA PERMBANGUNAN	1,749,076,588,581.00	1,664,853,106,045.00	82,194,259,172.00	1,746,847,365,217.00	99.87	
	4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	121,402,990,581.00	98,545,271,045.00	20,628,498,172.00	119,173,767,217.00	98.16	
	4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	92,392,287,984.00	78,158,303,484.00	17,319,769,470.00	95,478,072,954.00	103.34	
	4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	29,010,702,587.00	20,386,967,561.00	3,308,726,702.00	23,695,694,263.00	81.68	
	4 2 2	Dana Alokasi	1,627,673,598,000.00	1,566,107,835,000.00	61,565,763,000.00	1,627,673,598,000.00	100.00	
	4 2 2 2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,539,722,508,000.00	1,539,722,508,000.00	0.00	1,539,722,508,000.00	100.00	
	4 2 3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	87,951,090,000.00	26,385,327,000.00	61,565,763,000.00	87,951,090,000.00	100.00	
III	4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	582,814,025,562.00	590,176,886,861.00	19,382,194,901.00	610,159,181,762.00	104.89	
	4 3 1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	3,331,000,000.00	0.00	1,427,032,450.00	1,427,032,450.00	42.84	
	4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	139,913,853,358.00	152,613,385,157.00	18,251,029,177.00	170,864,414,334.00	122.12	
	4 3 4	Dana Penyesuaian dan Operasi Khusus	416,974,168,500.00	414,816,348,000.00	0.00	414,816,348,000.00	99.48	
	4 3 5	Dana Bantuan Keuangan dari Prop/Penda lainnya	22,555,520,000.00	22,707,570,000.00	0.00	22,707,570,000.00	100.67	
	4 3 6	Dana Bagi Hasil Retribusi	39,683,704.00	39,683,704.00	304,133,274.00	343,816,978.00	866.39	
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>2,836,047,816,784.00</b>	<b>2,650,773,446,872.23</b>	<b>147,838,717,329.46</b>	<b>2,798,612,164,201.69</b>	<b>98.68</b>	

Jember, 11 Januari 2015  
 KEPALA DINAS PENDAPATAN  
 KABUPATEN JEMBER  
 DINAS  
 PENDAPATAN  
 Drs. SUPRPTO, MM  
 Pemangku Utama Muda  
 NPM 0610721 198603 1 011